

Dr. Fauzan, M.A

KURIKULUM & PEMBELAJARAN

CURRICULUM



Buku “Kurikulum dan Pembelajaran” yang ada di hadapan pembaca merupakan buku yang sengaja disiapkan penulis sebagai bagian tugas dan kewajiban dosen mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat global serta kebutuhan dunia pendidikan. Tentu saja pengetahuan tentang “kurikulum” dan “pembelajaran” menjadi sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan, mahasiswa LPTK/FITK yang disiapkan menjadi calon guru professional, guru, dan praktisi pendidikan.

Istilah “kurikulum” sendiri terus menjadi topik menarik yang hangat untuk diperbincangkan, bukan sekedar secara teoritik praktis dibutuhkan guru di sekolah/madrasah, tetapi lebih karena kesadaran masyarakat dan pemerintah (sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengembangan kurikulum) terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bidang kurikulum. Pengembangan kurikulum pasti berimplikasi pada empat hal, yaitu perubahan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Mau tidak mau, suka atau tidak suka persoalan “kurikulum” dan “pembelajaran” selalu menjadi fenomena menarik untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut.

Sajian buku ini disusun berdasarkan pada kebutuhan perkuliahan, meliputi konsep/teori kurikulum, bentuk dan orientasi kurikulum, sejarah kurikulum, kebijakan pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum, kajian tentang teori pembelajaran, model pembelajaran, serta perpektif baru pembelajaran.

GP
PRESS

ISBN : 978-602-1568-89-7



KURIKULUM & PEMBELAJARAN

Dr. Fauzan, M.A

GP
PRESS

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Penulis:

Dr. Fauzan, M.A.,

GP Press

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Penulis: **Fauzan**

Editor : **Fatkhul Arifin**

Cover, Layout & Tata Letak : **Fatkhul Arifin**

Ukuran : **16 cm x 24 cm_ x + 288 hlm**

ISBN : 978-602-1568-89-7

Diterbitkan Oleh : GP Press

d.a. Jl. Dewi Sartika Ruko Mega Mall No. 21 Ciputat Tangerang Selatan, Tlp. (021) 74707560

© Hak Cipta pada Pengarang_2016 Hak Penerbitan ada pada Penerbit Isi Menjadi Tanggung Jawab Penulis

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang (All Right Reserved)
Cetakan Pertama, 2017

*Buku ini didedikasikan untuk:
Kedua Orang tuaku H. Syakuri, Hj. Khodijah (alm.)
Istriku Umi Kulsum, S.Ag, dan anak-anakku Aghni Qolba'Abidah Fafaza,
Bilqis Mumtaz Fitrah Faizah,
Afsar Tsaqif Azka Fauzan*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan, petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan buku Kurikulum dan Pembelajaran. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pera keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu setia mengikuti dan melanjutkan jejak-jejak dan perjuangannya.

Buku “Kurikulum dan Pembelajaran” yang ada di hadapan pembaca merupakan buku yang sengaja disiapkan penulis sebagai bagian tugas dan kewajiban dosen mengembangkan bahan ajar perkuliahan yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat global serta kebutuhan dunia pendidikan. Tentu saja pengetahuan tentang “kurikulum” dan “pembelajaran” menjadi sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh banyak kalangan, mahasiswa LPTK/FITK yang disiapkan menjadi calon guru profesional, guru, dan praktisi pendidikan.

Istilah “kurikulum” sendiri terus menjadi topik menarik yang hangat untuk diperbincangkan, bukan sekedar secara teoritik praktis dibutuhkan guru di sekolah/madrasah, tetapi lebih karena kesadaran masyarakat dan pemerintah (sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengembangan kurikulum) terus melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bidang kurikulum. Pengembangan kurikulum pasti berimplikasi pada empat hal, yaitu perubahan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Mau tidak mau, suka atau tidak suka persoalan “kurikulum” dan “pembelajaran” selalu menjadi fenomena menarik untuk dikaji dan dipahami lebih lanjut.

Sajian buku ini disusun berdasarkan pada kebutuhan perkuliahan, meliputi konsep/teori kurikulum, bentuk dan orientasi kurikulum, sejarah kurikulum, kebijakan pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum, kajian tentang teori pembelajaran, model pembelajaran, serta perpektif baru pembelajaran.

Trimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian buku ini, semoga menjadi amal baik dan “sangu” di akhirat nanti. Penulis berharap dan berdoa semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa

LPTK/Tarbiyah di Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran dari semua pembaca untuk penyempurnaan edisi selanjutnya.

Ciputat, September 2017

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
BAB II	KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN: UPAYA MELAHIRKAN GURU PROFESIONAL 7
BAB III	PROFESIONALISME GURU: TUNTUTAN SEBAGAI PENGEMBANG KURIKULUM 21
	A. Kajian Kompetensi 21
	B. Hakikat Pedagogik 32
	C. Guru Sebagai Pengembang Kurikulum 39
	D. Tantangan Guru Dalam Asean Economic Community (AEC)..... 45
	E. Profesionalisme Guru 47
	F. Tantangan Guru Profesional Menghadapi MEA ... 50
	G. MEA Menuntut Guru Lebih Profesional..... 52
BAB III	KONSEP, LANDASAN, DAN MODEL KURIKULUM 55
	A. Hakikat Kurikulum 55
	B. Bentuk dan Orientasi Kurikulum 62
	C. Langkah Pengembangan Kurikulum..... 65
	D. Fungsi dan Peran Kurikulum 72
	E. Landasan dan Prinsip Kurikulum 76
	F. Model Kurikulum 92
BAB IV	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA 105
	A. Kurikulum Masa Orde Lama 105
	B. Kurikulum Masa Orde Baru 112
	C. Kurikulum Era Reformasi 117
	1. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)..... 119
	2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 122

	3. Kurikulum Nasional 2013.....	124
D.	Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis KKNI ..	140
	1. Profil Lulusan dan <i>Learning outcome</i>	144
	2. Langkah Penyusunan Kurikulum Prodi Berbasis KKNI.....	145
E.	Kurikulum Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)	149
	1. Kurikulum Pendidikan Akademik dan PPG...	151
	2. Kurikulum Pendidikan Akademik, Profesi dalam Perspektif KKNI	154
BAB V	TEORI PEMBELAJARAN	158
	A. Hakikat Pembelajaran	158
	B. Tujuan Belajar.....	161
	C. Tingkatan Karakteristik Pelajar serta Hubungannya dengan Strategi Belajar.....	162
	1. Proses Perkembangan dan Hubungannya dengan Proses Belajar	162
	2. Kemampuan Awal (<i>Entry Behavior</i>)	164
D.	Model dan Teori Belajar	166
	1. Teori Behaviorisme.....	166
	2. Teori Kognitif	172
	3. Teori Belajar Sosial.....	173
E.	Orientasi Model Pembelajaran.....	173
BAB VII	PERSPEKTIF PEMBELAJARAN; MENGAJAR YANG MEMBELAJARKAN DAN BELAJAR YANG MENYENANGKAN	179
	A. Konsep Pembelajaran	179
	B. Komunitas Belajar dan Motivasi Siswa	181
	C. Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar	184
	D. Cara Membangkitkan Motivasi	185
	E. Indikator Motivasi Dalam Belajar	186
	F. Pola Hubungan Guru Siswa.....	187
	G. Guru dan Efektifitas Pembelajaran	190
	H. Merencanakan Pembelajaran	193
BAB VIII	KESIMPULAN	195

DAFTAR PUSTAKA	201
LAMPIRAN	207
BIODATA PENULIS.....	289

BAB I

PENDAHULUAN: KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN

Dasar Pemikiran

Pendidikan adalah ranah yang paling baik untuk mengadakan perubahan--perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang senantiasa menjadikan ilmu pengetahuan sebagai *resource* dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang maju adalah kehidupan yang terbingkai dengan nuansa ilmiah, peradaban yang maju dan nilai-nilai edukatif senantiasa menjadi performance dari geliat kehidupan masyarakat. Mereka menjadikan pendidikan sebagai pioner dalam memberantas segala kebodohan dan menghindari berbagai bentuk keterbelakangan serta kejumudan.

Namun peran pendidikan yang begitu mulia akan mengalami kesulitan dalam mengaktualisasikan perannya. Pendidikan dalam konteks transfer pengetahuan dan aktualisasi pengajaran, akan mengalami tantangan dan kendala di lapangan. Tantangan dan kendala adalah bagian dari dinamika dunia pendidikan yang meng-encourage partisipan pendidikan untuk senantiasa mengexplore dan melahirkan teori-teori pendidikan agar tetap survive dalam menghadapi tantangan dunia kini.

Karena hanya melalui pendidikan, kualitas baik tidaknya sumber daya manusia dapat ditentnukan. Akan tetapi pendidikan sebagai sebuah sistem tentu saja harus didukung oleh semua komponen yang terdapat dalam pendidikan. Mulai dari visi, misi,

tujuan, kurikulum, tenaga pendidik, pengelolaan, strategi dan pendekatan pembelajaran, metode, hingga pada persoalan evaluasi. Semua persoalan tersebut tentu saja akan sangat berkaitan dengan desain kurikulum yang dipersiapkan sekolah. Apakah kurikulum bermakna sebagai *course of outline*, Garis-garis Besar Program Pembelajaran, atau mencakup seluruh pengalaman yang diberikan pada anak dalam proses pendidikannya oleh guru. Dalam konteks ini Ronald C. Doll menjelaskan bahwa kurikulum sudah tidak lagi bermakna sebagai rangkaian bahan yang akan dipelajari siswa, tapi seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah. (Doll, 1964: 15)

Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di madrasah/sekolah atau perguruan tinggi. Secara lebih luas, kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas dari pada itu. (Supardi: 2013, 141) Selain sebagai konsep, pedoman yang dijadikan guru dalam kegiatan pembelajaran, kurikulum dapat diartikan sebagai berbagai aktifitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan, mulai dari penentuan atau pilihan pendekatan, strategi pembelajaran, pilihan metode, proses, serta evaluasi pembelajaran. Pengalaman-pengalaman positif dari kegiatan pembelajaran merupakan bagian dari konsep kurikulum.

Dengan demikian, dalam perkembangannya kurikulum mengalami penafsiran yang beragam dari para ahli pendidikan. Sebelumnya, kurikulum pernah diartikan sebagai "Rencana Pelajaran", yang terbagi menjadi rencana pelajaran minimum dan rencana pelajaran terurai. Pada tataran implementasinya, rencana pelajaran tersebut tidak semata-mata hanya membicarakan proses pengajaran saja, melainkan juga membahas cakupan yang lebih luas lagi, yaitu berbicara mengenai masalah pendidikan. Oleh karena itu, istilah "Rencana Pelajaran" ternyata belum bisa mewakili apa yang disebut dengan kurikulum.

Secara terminologis, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004: 3)

Dari penjelasan di atas, kurikulum seperangkat konsep yang berisi rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya. (Wina Sanjaya, 2009: 39) Prinsip tersebut meliputi 1) prinsip relevansi atau kesesuaian antara komponen yang terdapat dalam pendidikan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. 2) Prinsip fleksibilitas. Sebagai sebuah konsep dasar tentu saja keberadaan kurikulum harus memberikan ruang kepada pengelola pendidikan (termasuk guru dan siswa) untuk melakukan sebuah refleksi bahkan inovasi terhadap kurikulum yang sudah ada. 3) Prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. 4) Prinsip efektifitas dan efisiensi. Prinsip ini berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar.

Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan 10 aksioma atau aturan baku yang terdapat dalam kurikulum. Aksioma-aksioma tersebut adalah:

1. Perubahan itu pasti, keberadaannya merupakan bagian dari perkembangan kehidupan;
2. Kurikulum itu sebagai produk dari masyarakat;
3. Perubahan yang terjadi secara bersamaan dan ada perubahan setelah ada kurikulum baru;
4. Perubahan kurikulum terjadi karena ada perubahan dalam masyarakat;
5. Perubahan kurikulum merupakan kerja sama semua kelompok;
6. Perubahan kurikulum merupakan proses pengambilan keputusan;
7. Perubahan kurikulum bersifat berkelanjutan dan tidak akhir;
8. Perubahan kurikulum merupakan proses yang komprehensif;
9. Pengembangan kurikulum dilaksanakan secara sistematis;
10. Perubahan kurikulum berawal dari kurikulum yang sudah ada.

Dengan demikian, kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum. Rencana tertulis kemudian menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang

terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum selanjutnya melahirkan sistem pengajaran dan sistem pengajaran itulah yang menjadi pedoman guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Semakin jelas bahwa kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan serta isi yang harus dipelajari, sedangkan pengajaran adalah proses proses yang terjadi dalam interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa.

Bagi Saylor sebagaimana diungkap Prof. Wina Sanjaya bahwa kurikulum dan pengajaran itu seperti Romeo dan Juliet. Romeo tidak akan berarti apa-apa tanpa Juliet dan juga sebaliknya. Tanpa kurikulum sebagai sebuah rencana, maka pembelajaran atau pengajaran sebagai implementasi sebuah rencana. Seperti yang diungkap Saylor, Oliva (1992) mengungkapkan bahwa kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kurikulum berkaitan dengan konten materi/konsep yang diajarkan, pembelajaran selalu berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran dilakukan, bagaimana pilihan strategi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran diterapkan.

Secara substansial, kurikulum dipahami sebagai sebuah rencana kegiatan belajar para siswa di sekolah yang di dalamnya mencakup capaian pembelajaran (tujuan), bahan ajar, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran (baca: proses dan hasil). Kurikulum yang secara konseptual disusun para tenaga ahli dan telah dijadikan sebagai kebijakan nasional yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kurikulum sebagai sebuah sistem, yakni bahwa kurikulum merupakan rangkaian konsep tentang berbagai kegiatan pembelajaran yang masing-masing unit kegiatan memiliki keterkaitan secara koheren dengan lainnya, dan bahwa kurikulum itu sendiri memiliki keterkaitan dengan semua unsur dalam sistem pendidikan secara keseluruhan.

Sementara pembelajaran dipahami sebagai bentuk implementasi dari serangkaian konsep tertulis yang sudah dipersiapkan dalam kurikulum. Semua kegiatan pembelajaran, mulai dari tujuan, pemilihan metode, pendekatan, isi materi, hingga proses

evaluasi harus mengacu sepenuhnya pada kurikulum tersebut. Saat ini konsep pembelajaran di sekolah semakin berkembang, dari pengajaran yang bersifat tradisional sampai pembelajaran dengan system modern. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan mengajar yang mengabaikan kegiatan belajar, tetapi kegiatan pembelajaran yang lebih kompleks lagi dan dilaksanakan dengan pola-pola pembelajaran yang bervariasi. (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran UPI Bandung: 2009, 120)

Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua elemen yang saling terkait satu sama lain. Kurikulum akan semakin eksis manakala didukung oleh rangkaian kegiatan pembelajaran yang baik, sebaliknya pembelajaran tidak mungkin dapat berjalan dengan baik manakala tidak mengacu pada sebuah konsep tertulis yang kita sebagai kurikulum.

Permasalahan Kurikulum

Dari uraian di atas, ada permasalahan umum terkait dengan dengan kurikulum, yaitu: (1) sebagian masyarakat menganggap kurikulum hanya sebatas pada persoalan dokumen mati yang selalu mengiringi perjalanan politik nasional; (2) kurikulum dipandang sebagai sesuatu yang terpisah kegiatan pembelajaran (intruksional), sehingga dalam implementasinya antara konsep yang diidealkan dalam konsep kurikulum tidak sebanding lurus dengan kenyataan di kelas; (3) perubahan kurikulum (nasional) kurang mempertimbangkan sisi kesiapan dari para pengembang kurikulum di sekolah, yakni Kepala Sekolah, Pengawas, dan Guru. Dari problematika yang muncul, penulis menawarkan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana memposisi guru sebagai instrumen kunci dalam mengembangkan kurikulum?
2. Bagaimana memahami konsep, landasan, prinsip pengembangan kurikulum kepada semua komponen pendidikan?
3. Bagaimana memahami sejarah perkembangan kurikulum nasional kepada semua komponen pendidikan?
4. Bagaimana pembelajaran (dipahami) sebagai bagian integrated dari kurikulum?

Tujuan

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tujuan penulisan buku ini selain untuk ikut serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, juga untuk membantu mahasiswa dalam mempelajari dan mengetahui perkembangan kurikulum di Indonesia. Perkembangan kurikulum melahirkan guru-guru profesional yang berinovasi dan selalu memiliki konsep dan landasan dalam pembelajaran, oleh karena itu dalam buku ini juga kami bahas konsep, landasan dan model kurikulum serta teori pembelajaran.

Ruang Lingkup

Sejalan dengan tujuan di atas, maka ruang lingkup kajian dalam buku ini diantaranya:

1. Kurikulum dalam pendidikan
2. Professionalisme guru
3. Konsep, landasan, dan model kurikulum
4. Kebijakan pengembangan kurikulum di Indonesia
5. Teori pembelajaran
6. Perspektif pembelajaran

Metodologi

Penulisan buku ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (*content analysis*) dari berbagai dokumen tentang kurikulum dan pembelajaran. Ada dua sumber yang digunakan, yaitu: (1) sumber primer, semua sumber referensi, buku, seperti karya Olliva, Syalor yang berjudul "*Development of Curriculum*"; dan (2) sumber sekunder, semua informasi yang diperoleh dari bahan bacaan seperti hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, artikel, yang erat kaitannya dengan persoalan kurikulum dan pembelajaran. Selanjutnya, melakukan analisis pengkajian seluruh bahan bacaan yang ada, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Sasaran dari terbitnya buku ini umumnya adalah mahasiswa, sebagai bahan kajian mata kuliah yang berkaitan dengan judul buku

ini, serta para praktisi pendidikan yang memiliki ghirah dalam dunia pendidikan.

[]

BAB II

KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN:

Upaya Melahirkan Guru Pendidikan Agama Profesional

Perkembangan abad mutakhir dengan percepatan teknologi informasi menuntut semua pihak (termasuk lembaga pendidikan) terus melakukan inovasi pengembangan kelembagaan pendidikan. Kondisi tersebut juga telah mendorong masyarakat menyadari pentingnya peran lembaga pendidikan sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Keberadaannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan simultan antara sistem tata nilai yang harus dipatuhi dengan kerja nyata, konsisten, dan istiqomah yang ditunjukkan para pelaksana pendidikan, sehingga keinginan untuk memenuhi tuntutan kompetensi secara utuh (pengetahuan, *attitude*, dan *skill*) dapat terpenuhi. Pendidikan model seperti ini yang sesungguhnya merupakan syarat bagi terlaksananya proses “pembudayaan”, suatu bekal untuk mempersiapkan seseorang menjalani kehidupan secara baik dan mampu beradaptasi dengan suasana pekerjaan secara lebih baik. Masyarakat moderen adalah masyarakat *knowledge society*, dan siapa yang akan menempati posisi penting adalah *educated person*, masyarakat yang setiap anggotanya adalah manusia yang bebas dari ketakutan, bebas berekspresi, bebas untuk menentukan arah kehidupannya di dalam wadah persatuan dan kesatuan nasional (H.A.R. Tilaar, 1999: 16), sehingga nilai-nilai demokrasi dan

kebebasan sudah sepenuhnya tertanam kuat dalam tradisi masyarakat luas.

Kondisi masyarakat saat ini telah melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang sarat dengan kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi. Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong terjadinya kompetisi bagi lembaga pendidikan untuk selalu berfikir inovatif, kreatif, demi sebuah pengembangan kehidupan yang lebih maju. Kompetisi global telah membawa dampak di sektor pendidikan, salah satunya internasionalisasi pendidikan tinggi (Supriadi: 2000:11) yang terwujud melalui empat bentuk. *Pertama*, dibukanya cabang-cabang perguruan tinggi di negara lain (semacam kelas ekstensi), seperti perguruan tinggi Amerika membuka cabang di Asia. *Kedua*, kerjasama antara perguruan tinggi dari suatu negara dengan perguruan tinggi di negara lainnya yang menawarkan program gelar. *Ketiga*, kuliah jarak jauh baik melalui media cetak maupun secara *virtual* melalui *internet*. Sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Eropa, dan Australia menawarkan program gelar melalui model ini. *Keempat*, studi perbandingan mutu pendidikan tinggi yang menghasilkan peringkat perguruan tinggi dibandingkan dengan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Kompetisi global tersebut mau tidak mau harus dihadapi oleh pendidikan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta.

Dalam menghadapi kondisi kemajuan tersebut, hanya dua pilihan yang dapat diambil. Pilihannya, menyerah dan membiarkan diri tergerus oleh arus globalisasi atau secara cerdas mengambil manfaat dari proses globalisasi. Pilihan lainnya, untuk memasuki *the world systems* tersebut kita perlu menyiapkan diri dengan segenap kemampuan yang dapat dijadikan alat kompetisi dengan masyarakat global. Itu berarti, perlu dilakukan persiapan dan penataan berbagai perangkat yang dimiliki agar dapat menghadapi era tersebut dengan baik. Kunci kesuksesan suatu bangsa atau negara dalam *era of human capital* atau *knowledge society* ini terletak pada kualitas sumber daya manusia.

Kehidupan hari ini menuntut semua manusia unggul dan hasil karya yang unggul, baik secara personal, yakni bentuk keunggulan yang sangat berkaitan dengan kompetensi, kapabilitas dan profesionalitas dalam melakukan aktifitas; maupun keunggulan partisipatoris dalam bentuk jaringan (*networking*). Hal ini karena masyarakat abad 21 adalah masyarakat yang terbuka yang memberikan berbagai jenis kemungkinan pilihan. Dengan sendirinya

manusia yang unggul yang dapat bertahan di dalam kehidupan yang penuh persaingan dan menuntut kualitas kehidupan (H.A.R. Tilaar, 1999: 55).

Kecenderungan masyarakat modern biasanya cenderung memiliki sifat-sifat sebagai berikut: *Pertama*, terjadinya kecenderungan untuk berintegrasi dalam kehidupan ekonomi. Bagi negara-negara maju, integrasi ekonomi tersebut akan melahirkan persekutuan dan kekuatan baru yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan modal, perdagangan, dan perpolitikan dunia. *Kedua*, kemajuan yang sangat pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah secara radikal situasi dalam pasar tenaga kerja. Produksi barang serta pekerjaan mekanik-administratif yang semula membutuhkan banyak orang, dengan adanya kemajuan teknologi berupa komputer dan mesin-mesin canggih, hanya perlu ditangani oleh sedikit orang. Keadaan ini pada gilirannya akan melahirkan berbagai pekerjaan baru yang menuntut kecakapan yang juga baru dari orang-orang yang terdidik dan terlatih dengan baik (*well-educated and well-trained*), serta tersingkirnya tenaga-tenaga kasar dan tak terdidik. Jika tidak diantisipasi dengan baik, keadaan ini akan menimbulkan ledakan masalah sosial yang sangat serius seperti pengangguran, yang akan melahirkan efek berganda seperti kemiskinan, kebodohan, kesehatan, kriminalitas, dan kesenjangan yang kian menajam antar berbagai kelompok masyarakat dan antar negara. *Ketiga*, proses industrialisasi dalam ekonomi dunia makin mengarah pada teknologi tingkat tinggi. Negara-negara maju akan mengeksport alat-alat produksi berteknologi rendah ke negara-negara yang keadaan ekonomi dan teknologinya belum berkembang. Negara-negara maju akan memusatkan kegiatan ekonomi mereka pada usaha-usaha yang diperkirakan menghasilkan nilai tambah yang tinggi, seperti mikroelektronik, bioteknologi, telekomunikasi, penerbangan, robotik, serta *the new material-science industries*. Jika dibiarkan, keadaan ini akan makin menjauhkan negara miskin dan berkembang dari kesanggupannya untuk mengejar ketertinggalannya, apalagi mensejajarkan dirinya negara-negara maju. *Keempat*, akibat dari globalisasi informasi menimbulkan gaya hidup baru dengan segala aksesnya. Globalisasi memang menjanjikan kemudahan. Orang dapat berkomunikasi dengan apa dan siapa saja, serta dapat bepergian dengan cepat ke mana pun ia suka. Berbagai ide dan ilmu pengetahuan pun bertebaran di mana-mana dan dapat diakses oleh siapa pun. Namun, pada waktu yang

bersamaan, fenomena kehidupan destruktif pun seperti pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, konsumerisme, hedonisme, permisivisme, kriminalitas, dan ketercerabutan atau keterpecahan jati diri adalah fenomena kehidupan yang akan kian mewabah. *Kelima*, terjadinya kesenjangan antara peningkatan angka pertumbuhan penduduk serta keseimbangan jumlah penduduk usia tua dengan usia muda di satu sisi, dengan kesiapan negara dalam menanganinya di sisi lain. Meningkatnya jumlah penduduk akan menimbulkan tuntutan penyediaan infrastruktur kehidupan baru termasuk lembaga pendidikan, kebutuhan belajar baru, dan lapangan kerja yang juga baru. Sementara itu, ketidakseimbangan jumlah penduduk usia tua dengan usia muda akan melahirkan persoalan yang tak kalah krusialnya.

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bidang pendidikan. Salah satu tugas utama lembaga pendidikan mempersiapkan peserta didik menjadi subyek dengan perwujudan person yang memiliki kompetensi, tangguh, kreatif, mandiri dan profesional. Tuntutan lain dari lembaga pendidikan juga berupaya melakukan monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pendidikan yang berlaku, sehingga perbaikan, pembaharuan di semua sektor pendidikan dapat terwujud.

Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) terjadinya degradasi moral peserta didik, (5) status kelembagaan, (6) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional (Tilaar, 1999: 41-43).

Penataan terhadap sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja menjadi target capaian yang utama. Kegiatan belajar diarahkan pada upaya membekali peserta didik dengan sebuah kecakapan hidup (*life skill* atau *life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik di setiap lembaga pendidikan

diharapkan mempunyai kemampuan dan keunggulan dan siap bersaing dalam masyarakat.

Peningkatan kemampuan dan keunggulan tersebut tentu saja perlu ada perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kondisi tersebut tentu saja setiap komponen dalam pendidikan harus saling mendukung dan terikat satu sama lain. Mulai dari komponen tujuan, peserta didik, guru atau pendidik, isi atau kurikulum, manajemen, alat bantu belajar, fasilitas, teknologi, biaya, lingkungan, hingga proses evaluasi dalam pendidikan.

Dalam perspektif pendidikan, guru merupakan komponen terpenting dari semua komponen yang tersedia, kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat, posisinya memiliki peran yang cukup strategis, *central*, bahkan menjadi penentu terjadinya keberhasilan interaksi edukatif dalam pembelajaran. Di sekolah, guru merupakan orang pertama yang mencerdaskan manusia, orang yang memberi bekal pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya, dan agama terhadap anak didik. Dalam proses pendidikan, setelah peran orang tua (keluarga di rumah) guru memegang peran paling penting dalam melakukan upaya perubahan perilaku peserta didik. Tugas utamanya antara lain membimbing, mengajar, dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Dalam UU Guru dan Dosen disebutkan bahwa "guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". (UU No. 14 tahun 2005) Harapannya, setelah proses pendidikan sekolah selesai, peserta didik mampu hidup dan mengembangkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang sudah melekat di dalam dirinya (Martinis Yamin, 2005: 64).

Sebagai pendidik profesional, tentu saja tidak semua orang dapat melakukan proses pembelajaran, apalagi pendidikan. Hal ini karena ada perbedaan mendasar antara "pendidikan" dengan "pengajaran" sebagaimana pemahaman banyak orang yang menganggapnya sama. Pengajaran dipahami sebagai satu proses penyampaian pengetahuan atau proses memberitahu orang lain (*transfer of knowledge*). Oleh karenanya, hampir semua orang dapat

melakukan kegiatan pengajaran. Istilah pendidikan sendiri harus dipahami sebagai upaya memberikan wawasan keilmuan, keterampilan, perubahan tata nilai (manusia berkarakter), sikap, bahkan mengarahkan peserta didik sesuai tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 UU No. 3 tahun 2003). Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan pendidikan berupaya membentuk manusia yang senantiasa taat kepada Allah SWT, pemimpin (*khalifah*) di muka bumi, dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Untuk sampai pada tujuan tersebut, tidak sembarang orang dapat melakukan kegiatan pendidikan. Pendidik (guru, dosen) profesional dituntut memiliki kualifikasi pendidikan minimum (sarjana), serta kemampuan (*competency*) dan *capabilitas*, dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

Hal lain yang tak kalah penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Dalam setiap jenjang pendidikan formal, kurikulum berperan sangat strategis karena keberadaannya menghubungkan sebuah idealisme cita-cita pendidikan (tujuan) dengan kenyataan atau praktik pendidikan yang mengarah pada sebuah pencapaian tujuan. Kurikulum juga merupakan bentuk pengejawantahan dari idealisme dan aspirasi pendidikan dalam bentuk nyata yang akan diwujudkan dalam praktik pendidikan. Kurikulum dapat berfungsi sebagai alat, sekaligus sebagai gambaran bagaimana praktik pendidikan dilaksanakan hingga tercapainya sebuah tujuan pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan pendidikan, sehingga hasil pendidikan sangat diwarnai oleh keberadaan kurikulum tersebut. Posisi dan peran kurikulum yang central tersebut yang menyebabkan kurikulum selalu menjadi fokus utama dalam setiap perubahan sistem pendidikan.

Guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, seperti biaya, manajemen, sarana-prasarana, metode, dan pendekatan tidak akan banyak berarti apa-apa apabila esensi pembelajaran, yakni interaksi guru dengan peserta didik serta kurikulum yang diajarkannya tidak berjalan dengan baik. Semua komponen

pendidikan tersebut sangat bergantung pada posisi guru dan materi yang diajarkannya. Begitu pentingnya peran guru dan kurikulum dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru dan proses pengembangan kurikulum.

Secara akademis, muatan kurikulum mengandung arti konsep dan rancangan dokumen, namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman guru. Sebagai sebuah proses, pengembangan kurikulum dilakukan banyak pihak, mulai dari pihak kementerian pendidikan nasional (baca: pusat kurikulum), pakar ilmu pendidikan, administrator pendidikan, orang tua, peserta didik, hingga guru sebagai pengembang kurikulum yang secara operasional dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Oemar Hamalik mengatakan bahwa, guru dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum. Peranannya sebagai pengembang kurikulum, antara lain melakukan: 1) pengelolaan administratif; 2) pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum; 3) meningkatkan keberhasilan sistem intruksional; 4) meningkatkan pemahaman konsep diri; serta 5) memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan peserta didik. Dalam konteks pengembangan kurikulum, guru adalah sosok paling "bertanggung jawab" dalam penyuguhan materi yang diajarkan. Pembelajaran harus didasarkan pada pencapaian Indikator Kompetensi (IK) yang telah disiapkan guru. Setiap guru mengemban tanggung jawab secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengadministrasian dan perubahan kurikulum. Keterlibatan guru juga akan turut menentukan keberhasilan pengajaran di sekolah. Karena pada dasarnya, para guru itulah yang paling mengetahui berbagai masalah kurikulum yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, berbagai saran mereka sangat diperlukan dalam perencanaan atau penyusunan kurikulum baru, tentu saja melalui prosedur langsung maupun tidak langsung (Oemar Hamalik, 2009: 52).

Untuk maksud dan tujuan tersebut, guru diharapkan memiliki kompetensi atau kumpulan kemampuan, menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, serta dikuasai oleh guru dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai "tenaga profesional", yaitu sosok yang secara profesionalitas menguasai aspek, yaitu: a) Ilmu pengetahuan

tertentu; b) Aplikasi kemampuan/kecakapan, dan c) Berkaitan dengan kepentingan umum.

Hal ini sebagaimana dikatakan Kunandar (2011: 45) bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Pekerjaan yang khusus mensyaratkan persiapan spesialisasi akademik dalam waktu yang relatif lama, baik dalam bidang sosial, eksakta, maupun seni, dengan penekanan pada aspek intelektual, mental, bukan pada aspek kemampuan fisik semata. Pendapat lain dikemukakan oleh Sikun Pribadi (1991: 1) yang mengatakan bahwa profesi pada hakekatnya merupakan suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengabdikan di rinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa profesi itu pada hakekatnya muncul karena kesediaan pribadi seseorang secara terang-terangan untuk mengabdikan dirinya pada jabatan pekerjaan yang ditekuninya (Muh. Nurdin, 2004:120).

Profesi juga pada hakekatnya adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) Bersangkutan dengan profesi, (2) Memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (3) Mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Syafrudin Nurdin 2003 : 15). Sebagai sebuah profesi, dapat juga berwujud sebagai jabatan dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat (Tilaar, 2002 : 86). Profesi sendiri berarti menunjukkan lapangan yang khusus dan mensyaratkan studi dan penguasaan pengetahuan khusus yang mendalam. Profesi sangat berkaitan dengan penguasaan bidang keilmuan tertentu dan menjadi keahlian (*skill*) khusus, misalnya hakim, dokter, akuntan, advokat, komputer, dan guru.

Dengan demikian, sebagai pekerjaan profesional guru dipahami sebagai profesi yang tidak sembarang orang mampu melakukannya, guru memerlukan keterampilan khusus untuk mengajar (*teaching skill*), pemahaman yang utuh tentang peserta didik ketika melaksanakan pendidikan, perlu kepribadian yang cakap dalam pembinaan dan lain sebagainya.

Berbagai pendapat di atas, memberikan kesimpulan bahwa pekerjaan profesional berarti pekerjaan yang sangat membutuhkan wawasan keilmuan, kepribadian baik, serta memiliki keahlian atau ketrampilan (*skill*) untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Semakin tinggi pendidikan yang dilalui seseorang, maka semakin tinggi pula derajat profesi yang diembannya. Tinggi rendahnya pengakuan profesionalisme sangat bergantung kepada keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuh.

Dalam konteks Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), menurut Muhaimin (2008: 121) guru profesional seharusnya dibarengi dengan etos kerja yang tinggi, karena antara keduanya saling melengkapi untuk menghasilkan mutu akademik atau produk kerja yang bermutu. Hanya saja, terkadang guru GPAI hanya menampilkan diri sebagai sosok guru spiritual dan/atau guru moral belaka yang lebih berkonotasi sufistik, dan dalam bentuk hubungan patron-klien (guru-peserta didik) dalam kehidupan mistik. Suasana hubungan kesetiaan antara GPAI dan peserta didik tidak harus selalu berprespektif doktriner sebagaimana ungkapan di atas, tetapi harus diciptakan suasana hubungan kritis-dinamis yang dapat berimplikasi dan berkonsekuensi pada peningkatan daya kreativitas, etos ilmu dan etos kerja secara bersama-sama dari GPAI itu sendiri dan sekaligus peserta didiknya (Muhaimin, 2008: 122).

Bila dilihat dalam kaca mata perundang-undang pendidikan, istilah "guru profesional" -termasuk GPAI- berarti guru secara kualifikasi akademik minimal berpendidikan D4/S1, dan secara kualitatif harus memiliki empat (4) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Adanya undang-undang dan peraturan tentang guru profesional tersebut, tentu saja berlaku secara nasional, termasuk di dalamnya kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam. Tujuan awal didirikannya PAI sebenarnya hampir sama dengan perkembangan PTAI, yakni "melahirkan ahli-ahli agama dan para pemimpin Islam", walaupun belakangan tujuan tersebut mulai diragukan banyak kalangan. Ada tiga fungsi tradisional PTKI, yaitu; *pertama*, sebagai media penyampai pengetahuan agama (*transfer of Islamic knowledge*), *kedua*, sebagai media pemelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*) dan yang *ketiga*, sebagai media pencetak ulama (*reproduction of ulama*). (Jurnal Madrasah, Vol. I, No. 4, 1998, h. 6).

Pertanyaannya, apakah tujuan tersebut masih relevan dengan kondisi kekinian? Realitas yang muncul masih ada kelemahan kurikulum PTAI, misalnya: 1) kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, banyak program studi yang tidak diminati masyarakat tetap dipertahankan; 2) kurang efektif, yakni tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan harapan; 3) kurang efisien, yakni banyaknya mata kuliah dan sks tidak menjamin dihasilkannya lulusan yang sesuai harapan; 4) kurang fleksibel, yakni PTAI kurang berani secara kreatif dan bertanggung jawab mengubah kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (setempat, nasional tau global); 5) *readability* rendah, tidak komunikatif (bisa menimbulkan banyak tafsir); 6) hanya berupa deretan mata kuliah; 7) berbasis (berfokus) pada mata kuliah/penyampaian materi, bukan pada tujuan kurikuler/hasil belajar/mutu lulusan; dan 8) hubungan fungsional antar mata kuliah yang mengacu pada tujuan kurikuler kurang jelas. (Muhaimin, 2007; 221) Oleh karena itu, muncullah gagasan penerapan kurikulum berbasis kompetensi sebagai perwujudan dari pendekatan teknologis, sehingga dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisa kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Seseorang dianggap memiliki kompetensi dalam melakukan tugas atau pekerjaan tertentu memerlukan: (1) *basic skill*, (2) *thingking skill*, dan (3) *personal quality*. (Muhaimin, 2007; 220)

Dengan kurikulum tersebut diharapkan lahir sebuah kompetensi dan perilaku guru dapat meningkat. Kompetensi yang harus dimiliki GPAI mencakup dua (2) hal, yaitu: kompetensi *personal religious* sebagai kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian seorang guru, karakteristik, sifat, perilaku, serta *performance*; serta kompetensi *professional religious*, sebuah kemampuan pedagogis atau kemampuan yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran (*teaching skill*). Terkait dengan kemampuan tersebut, Imam al-Ghazali berpandangan bahwa seorang guru seharusnya memiliki sifat-sifat berikut: (1) kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri; (2) peneladanan pribadi Rasulullah; (3) bersikap objektif; (4) bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik; (5) bersedia mengamalkan ilmunya. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy Personal Religious mencakup: (1) tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya bersifat robbani; (2) bersikap ikhlas; (3) bersikap sabar; (4) bersikap jujur; (5) bersikap adil. Menurut Brikan Barky Al-Quraisyi

mencakup: (1) mengajar hanya untuk mencari keridhaan-Nya; (2) bersedia mengamalkan ilmunya; (3) bersikap amanah; (4) bersikap lemah lembut dan kasih saying terhadap peserta didik (lihat Muhaimin, 2008: 97-98).

Terkait dengan penguasaan kompetensi pedagogik, GPAI harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan yang handal tentang peserta didik secara seimbang antara konsep pendidikan umum dengan konsep pendidikan Islam, baik berkaitan dengan (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) pengembangan kurikulum/silabus; (4) perancangan pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sehingga penguasaan kemampuan tentang pedagogik tidak lagi hanya berhenti pada wawasan/pengetahuan yang diperoleh dari ilmuan-ilmuan Barat, tetapi juga mengakomodir konsep-konsep pedagogik yang coba dikembangkan pemikir pendidikan Islam. Al-Gazali misalnya, menyebutkan bahwa sosok guru harus memiliki kemampuan yang mencakup: (1) menyajikan pelajaran sesuai dengan taraf kemampuan peserta didik; dan (2) terhadap peserta didik yang kurang mampu, sebaiknya diberi ilmu-ilmu yang global dan tidak detail. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawy dalam bukunya Muhaimin disebutkan bahwa kemampuan pedagogis tersebut mencakup: (1) senantiasa membekali diri dengan ilmu dan mengkaji serta mengembangkan kemampuan profesionalnya; (2) mampu menggunakan variasi metode mengajar dengan baik sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan situasi belajar mengajar; (3) mampu mengelola peserta didik dengan baik; (4) memahami kondisi psikis dari peserta didik; (5) peka dan tanggap terhadap kondisi dan perkembangan baru (Muhaimin, 2008: 98).

Berhubungan dengan kompetensi kepribadian, guru dan dosen dituntut memiliki kepribadian yang utuh, mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mampu melakukan evaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Terkait dengan kompetensi tersebut, para pakar pendidikan Islam, seperti Muhammad Athiyah Al-Abrasy menyebutkan minimal ada tujuh (7) sifat kepribadian yang harus dimiliki guru (al-Abrasy, 1999: 132)., yaitu: *Pertama*, seorang guru harus memiliki sifat zuhud, yaitu tidak mengutamakan untuk

mendapat materi dalam tugasnya, melainkan karena mengharapkan keridlaan Allah semata-mata. *Kedua*, seorang guru memiliki jiwa yang bersih dan terhindar dari sifat dan akhlak yang buruk. Seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya, terhindar dari dosa besar, pamer, dengki, permusuhan, dan sifat-sifat lainnya yang tercela menurut agama Islam. *Ketiga*, seorang guru harus ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. *Keempat*, seorang guru juga harus bersifat pemaaf terhadap peserta didiknya. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak sabar, dan jangan pemarah, karena sebab-sebab yang kecil. *Kelima*, seorang guru harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang bapak sebelum ia menjadi seorang guru. *Keenam*, seorang guru harus mengetahui bakat, tabiat, dan watak peserta didik-peserta didiknya. *Ketujuh*, seorang guru harus menguasai bidang studi yang akan diajarkannya. Apa yang ditawarkan Athiyah tentang sifat yang harus dimiliki guru sangat sesuai dengan komponen kompetensi kepribadian sebagaimana diuraikan di atas. Hanya saja uraian yang ditawarkan masih “tercampur” antara kompetensi pedagogik dengan kompetensi profesional.

Terkait dengan kompetensi sosial, tentu saja guru harus mampu melakukan komunikasi lisan dan tulisan dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini terkait dengan adanya tanggung jawab pendidikan yang harus diemban oleh 3 pihak, yaitu pihak sekolah (guru), orang tua peserta didik, serta masyarakat. Dilihat dari tempat berlangsungnya pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara, membedakan menjadi tiga dengan sebutan Tri Pusat Pendidikan, yaitu: Pendidikan dalam keluarga (pendidikan informal), pendidikan dalam sekolah (pendidikan formal), dan pendidikan di dalam masyarakat (pendidikan non formal). Adanya jenis kelembagaan pendidikan tersebut, menuntut perlunya kemampuan berkomunikasi antara ketiganya. Hal ini menjadi penting, karena berbagai permasalahan yang dihadapi peserta didik dapat dibagikan sekaligus diberi alternatif solusinya. Kemampuan lainnya, guru juga harus mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, terbiasa bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang

menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Bagi GPAI, penguasaan konsep keilmuan yang menjadi kebutuhan ketika berinteraksi dengan peserta didik mencakup penguasaan mata pelajaran Fiqh, al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Mewujudkan guru profesional sangat terkait dengan penyiapan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) -termasuk Fakultas Tarbiyah—menyiapkan satu rancangan/desain, mulai dari tahapan penerimaan (*input*), kurikulum yang disampaikan, kesiapan tenaga pengajar, proses pembelajaran, hingga evaluasi produk (*output*) yang dihasilkan.

Pengelola pendidikan harus mampu menawarkan sebuah kurikulum yang mampu mengakomodir keinginan masyarakat, yakni orang tua, tokoh masyarakat, serta dunia usaha. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi tertentu punya "angan-angan" agar anaknya kelak memiliki segudang pengetahuan yang diandalkan, sikap/moralitas yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan, sekaligus memiliki keterampilan (*skill*) mumpuni yang pada akhirnya nanti dapat bersaing dalam dunia usaha secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum harus dapat mengakomodir semua pihak yang terkait.

Saat ini di beberapa jurusan Pendidikan Agama, kurikulum yang ditawarkan masih belum maksimal, antara penyiapan calon guru agama di madrasah dengan atau kurikulum di sekolah. Jika kurikulum disiapkan untuk menyiapkan calon guru agama di madrasah, maka secara konten kurikulum harus diarahkan pada pemahaman tentang materi-materi Fiqh, Akidah Akhlak, Qur'an Hadis, Sejarah kebudayaan Islam (PAI madrasah) sesuai dengan kebutuhan guru di madrasah. Selain pada proses pembentuk nilai karakter, peserta didik madrasah dituntut juga memiliki wawasan, bahkan penguasaan yang komprehensif tentang materi-materi PAI. Sangat wajar bila dalam implementasi kurikulum PAI madrasah terlihat lebih detail dan rigit.

Sementara itu, jika kurikulum diarahkan untuk penguatan dan penyiapan calon guru agama di sekolah, maka konten kurikulum yang disiapkan antara lain materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah, yakni hanya sebatas pada proses

penanaman nilai agama, perilaku positif, serta pembentukan nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari, dan seharusnya bukan mengajari mereka tentang materi-materi PAI. Ketidakjelasan arah kurikulum ini yang kemudian berimplikasi pada *learning outcome* atau sasaran pembelajaran yang diharapkan tidak pernah menemukan eksistensi yang diinginkan. Di harapkan melalui perubahan kurikulum program studi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), semua pengelola prodi semakin memperjelas dan mempercantik orientasi profil lulusan yang diharapkan, capaian pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan madrasah dan sekolah secara bersamaan.

BAB III

PROFESIONALISME GURU: Tuntutan Sebagai Pengembang Kurikulum

A. Kajian Kompetensi

Sebelum mengkaji tentang kompetensi pedagogik, ada baiknya terlebih dahulu dikaji penjelasan tentang dua istilah yang terkait dengan kompetensi pedagogik.

Secara bahasa, kompetensi atau *competency* (bahasa Inggris) berarti kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas/pekerjaan yang dilakukan. Dalam penerapannya, kompetensi berkaitan dengan erat satu profesi pekerjaan tertentu yang diemban. Seorang pekerja disebut profesionalitas manakala dengan kemampuannya mampu menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Profesionalitas dapat diartikan sebagai jenis yang khas atau pekerjaan yang memerlukan pengetahuan, atau dapat juga berarti beberapa keahlian atau ilmu pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain, instansi, atau sebuah lembaga (Mukhtar, 2000: 79). Dalam bahasa Arab, kata *profesi* sering dihubungkan dengan kata *ahill* yang dapat mengandung arti keluarga, penduduk asli (*domestik*), alamat (*resident*), asal usul tempat tinggal yang asli (*indegenuous, home*), dan asal usul kewarganegaraan (*nationality*), dan *ahliyah* yang berarti *attitude* (sikap dan kepribadian), *fitnes* (kesiapan) *suitableness* (kelayakan untuk digunakan), *competence* (kecakapan), dan *qualification* (kemampuan tertentu) (Abuddin Nata, 2007: 15). Dengan kata lain, istilah profesional atau ahli selain ditujukan dengan kecakapan dalam melakukan pekerjaan, berpengatahuan, dan

berpengalaman juga terkait dengan sikap mental yang lurus, jujur, adil, manusiawi, terbuka, objektif, berpandangan jauh ke depan, dewasa, mampu mengendalikan diri, dan berfikir sebelum berbuat. Penyebutan seorang profesional sangat bergantung pada kemampuan (*competency*) khusus yang dimilikinya, seperti seseorang yang memiliki kemampuan mendiagnosa, memberikan obat sesuai penyakit yang diderita, maka dengan kemampuannya tersebut masyarakat menyebutnya seorang "dokter", termasuk pada profesi yang lainnya (sebut saja akuntan, konseler, jurnalis/wartawan, guru dan lainnya).

Untuk memahami kompetensi tersebut Hamzah B. Uno (2009: 79) membaginya ke dalam dua bagian, yaitu *threshold competences* dan *defferentiating competences*. *Theshold competences* adalah karakteristik esensial (biasanya pengetahuan atau keterampilan dasar, seperti kemampuan membaca) yang seseorang butuhkan untuk menjadi efektif dalam suatu pekerjaan, tetapi bukan untuk membedakan pelaku superior dari yang rata-rata. Contoh, pengetahuan pedagang tentang produk atau kemampuan mengisi faktur. Selanjutnya adalah *differentiating competences* yang memberikan perbedaan pada pelaku yang superior dari perilaku yang biasa. Sampel orientasi prestasi yang diekspresikan pada tujuan seseorang adalah lebih tinggi dari yang dikehendaki oleh organisasi.

Pendidikan dalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki kompetensi guna menunjang kesuksesan tugas-tugasnya. Kompetensi yang dimiliki dapat berupa kompetensi keilmuan, fisik, sosial, dan juga etika moral. Di antara sekian banyak tugas dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik, di antaranya adalah:

1. Mengerjakan sesuai dengan kemampuan (bidang keilmuan) – nya, dalam arti pendidikan harus memahami dan menguasai ilmu yang diajarkan serta peta konsep dan fungsinya agar tidak menyesatkan dan harus selalu belajar untuk mendalami ilmu.
2. Berperilaku rabbani, takwa dan taat kepada Allah.
3. Memiliki integritas moral sebagaimana Rasul bersifat *shidiq* (jujur), *amanah* (memegang tugas dengan baik), *tabligh* (selalu menyampaikan informasi dan kebenaran), *fathonah* (cerdas bersikap).
4. Mencintai dan memiliki kebanggaan terhadap tugas-tugas keguruan serta melaksanakannya dengan penuh gembira, penuh kasih sayang, dan penuh dengan ketenangan dan kesabaran.

5. Memiliki perhatian yang lebih dan adil terhadap individualitas dan kolektivitas peserta didik.
6. Sehat dari segi rohani, dewasa dalam bersikap, menjaga kemuliaan (*wara*), humanis, berwibawa, dan penuh keteladanan.
7. Menjalani komunikasi yang harmonis dan rasional dengan peserta didik dan masyarakat.
8. Menguasai perencanaan, metode dan strategi mengerjakan dan juga mampu melakukan pengelolaan kelas dengan baik.
9. Menguasai perkembangan fisik dan psikis peserta didik serta menghormatinya.
10. *Eksploratif, apresiatif, responsif, dan inovatif* terhadap perkembangan zaman, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi.
11. Menekankan pendekatan *student centered, learning by doing*, dan kajian intelektual-integral.
12. Melakukan promosi wacana, pembentukan watak dan sikap keilmuan yang otonom.

Dalam konteks pendidikan, guru dipandang sebagai sosok bertanggung jawab melaksanakan pendidikan. Dalam Undang-undang sendiri, guru disebut sebagai pendidik profesional, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara kontinu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tugas guru tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh S. Nasution menjadi tiga bagian. *Pertama*, sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan. Dengan tugasnya ini, maka guru

harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkannya. Sebagai tindak lanjutnya dari tugas ini, maka seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus ia pelajari. *Kedua*, guru sebagai model (percontohan), yaitu dalam bidang studi yang diajarkan merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga guru tersebut menjadi model atau contoh nyata dari yang dikehendaki oleh mata pelajaran tersebut. Hal ini lebih nampak pada pelajaran bidang studi akhlak, keimanan, kebersihan, dan sebagainya. Jika guru sendiri tidak memperlihatkan keindahan dan manfaat mata pelajaran yang diajarkannya, jangan diharapkan bahwa anak-anak akan menunjukkan antusias untuk mata pelajaran itu. Guru yang tidak menunjukkan keberanian untuk berpikir intuitif, tidak akan dapat membina anak-anak yang mempunyai keberanian itu. *Ketiga*, guru juga menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat berpikir, mencintai pelajarannya, atau yang mematkan idealisme dan picik dalam pandangannya. (S. Nasution, 1989: 14)

Kompetensi guru pada hakikatnya tidak terlepas dari konsep hakikat guru serta tugas guru (Spencer, 1993:7). Kompetensi guru memberikan gambaran pada tugas dan kewajiban guru yang harus dilakukan sehubungan dengan makna jabatan guru yang menuntut suatu kompetensi tertentu sebagaimana telah yang telah disebutkan. Ace Suryadi (1999: 298-304) mengemukakan bahwa untuk mencapai taraf kompetensi seorang guru membutuhkan waktu lama dan biaya sangat mahal.

Kompetensi pada dasarnya merupakan suatu gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan (*be able to do*) seseorang terhadap suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seharusnya dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Seseorang dapat melakukan (*be able to do*) suatu pekerjaannya, ketika yang bersangkutan memiliki kemampuan (*ability*) dalam pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Majid (2005: 6) menjelaskan bahwa kompetensi yang dimiliki setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi bisa terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Robotham (1996: 27) meyakini bahwa kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman. Bagi Usman,

kompetensi menggambarkan kualifikasi pendidikan atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif (Kunandar, 2007: 51). Kemampuan yang harus ditunjukkan melalui aktivitas nyata, serta ditunjukkan melalui sikap keseharian. Hal ini sejalan dengan pendapat Charles E. Johnson yang mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Uzer Usman, 2005: 14). Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan menyelesaikan tugas dengan dukungan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai amanah jabatan yang diemban, sehingga yang bersangkutan dapat merefleksikan melalui daya pikir rasional dan memiliki kemampuan bertindak secara profesional.

Dalam konteks global, kompetensi seorang guru sangat diperlukan, terutama terkait dengan kemampuan memberikan wawasan keilmuan serta informasi terbaru tentang pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkap Ilghiz Sinagatullin dalam bukunya *Teaching Is More Than Pedagogical Practic* yang mengatakan bahwa:

To enhance global competency, educators need to increase their global knowledge base. First of all, they are required to enrich their global knowledge in the subject areas that they are teaching. For instance, a history teacher inspired by global perspectives needs to learn more about world history. The teacher can then integrate this information into the teaching process, which may considerably motivate children's cognitive processes. (Sinagatullin, 18)

Untuk meningkatkan kompetensi global, pendidik perlu meningkatkan basis pengetahuan global mereka. Pertama-tama, mereka diwajibkan untuk memperkaya pengetahuan global mereka di bidang studi yang mereka ajarkan. Misalnya, seorang guru sejarah terinspirasi oleh perspektif global perlu belajar lebih banyak tentang sejarah dunia. Guru kemudian dapat mengintegrasikan informasi ini ke dalam pengajaran proses, yang sangat mungkin memotivasi proses kognitif anak-anak. Untuk itu, kompetensi sangat berkaitan dengan aspek sikap (*attitude*), pengetahuan, dan keterampilan seorang guru dalam pembelajaran.

Dasar kompetensi dikemukakan oleh Syah (2000: 229) sebagai suatu kemampuan atau kecakapan. Selanjutnya kompetensi diartikan oleh Usman (1994: 1) suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau

kemampuan seseorang, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. McAhsan (1981: 45) dalam Mulyasa (2003: 38) mengartikan bahwa kompetensi: "...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors". Pemahaman penulis dari pengertian yang dikemukakan tersebut bahwa kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dalam Kamus Wikipedia, dikemukakan beberapa definisi terkait dengan kompetensi: *Pertama*, Richard E. Boyatzis (2008) mengartikan kompetensi sebagai karakteristik-karakteristik dasar seseorang yang menuntun atau menyebabkan keefektifan dan kinerja yang menonjol. *Kedua*, menurut *Glossary Our Workforce Matters* (Sinnott. et.al, 2002), kompetensi diartikan sebagai karakteristik dari karyawan yang berkontribusi kinerja pekerjaan yang berhasil dan pencapaian hasil organisasi. Hal ini mencakup pengetahuan, keahlian dan kemampuan ditambah karakteristik lain seperti nilai, motivasi, inisiatif dan control diri. *Ketiga*, Pengertian lain dikemukakan oleh Le Boterf dalam Denise et. al (2007) menyatakan : kompetensi merupakan sesuatu yang abstrak; hal ini tidak menunjukkan adanya material dan ketergantungan pada kegiatan kecakapan individu. Jadi kompetensi bukan keadaan tapi lebih pada hasil kegiatan dari pengkombinasian sumberdaya personal (pengetahuan, kemampuan, kualitas, pengalaman, kapasitas kognitif, sumberdaya emosional, dan lainnya) dan sumberdaya lingkungan (teknologi, database, buku, jaringan hubungan, dan lainnya). *Terakhir*, kompetensi Menurut Sinnott et. al (2002), adalah alat pengkritisi dalam tugas kerja dan pergantian perencanaan. Di tingkat minimum, kompetensi berarti: a) mengenali kapabilitas, sikap dan atribut yang dibutuhkan untuk memenuhi staf saat ini dan dimasa depan sebagai prioritas organisasi dan pertukaran strategis dan b) memfokuskan pada usaha pengembangan karyawan untuk menghilangkan kesenjangan antara kapabilitas yang dibutuhkan dengan yang tersedia. (<http://id.wikipedia.org>)

Merujuk pada definisi-definisi di atas, kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah kombinasi antara intelektualitas, *performance* pribadi (*attitude*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan

komunikasi. Dalam sejumlah literatur, kompetensi sering dibedakan menjadi dua tipe, yakni *soft competency* atau jenis kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Tipe kompetensi yang kedua sering disebut *hard competency* atau jenis kompetensi yang bisa dikaitkan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni.

Dari uraian di atas, semakin jelas bahwa segenap kemampuan yang harus dimiliki seseorang terkait dengan kesiapan, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran merupakan kompetensi dasar (*basic competency*) yang harus melekat pada seorang guru.

Dengan demikian, istilah "kompetensi" merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kepmendiknas No. 045/U/2002 menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Mulyasa, 2008: 25). Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Kunandar, 2007: 52).

Sebagai pembanding, dari *National Board for Profesional Teaching Skill* (2002) telah merumuskan standar kompetensi bagi guru di Amerika, yang menjadi dasar bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, dengan rumusan *What Teachers Should Know and Be Able to Do*, di dalamnya terdiri dari lima proposisi utama, yaitu:

- 1) *Teachers are Committed to Students and Their Learning* yang mencakup: (a) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (b) pemahaman guru tentang perkembangan

belajar siswa, (c) perlakuan guru terhadap seluruh siswa secara adil, dan (d) misi guru dalam memperluas cakrawala berfikir siswa.

- 2) *Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects to Students* mencakup: (a) apresiasi guru tentang pemahaman materi mata pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan dengan mata pelajaran lain, (b) kemampuan guru untuk menyampaikan materi pelajaran (c) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara (*multiple path*).
- 3) *Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student Learning* mencakup: (a) penggunaan berbagai metode dalam pencapaian tujuan pembelajaran, (b) menyusun proses pembelajaran dalam berbagai setting kelompok (*group setting*), kemampuan untuk memberikan ganjaran (*reward*) atas keberhasilan siswa, (c) menilai kemajuan siswa secara teratur, dan (d) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran.
- 4) *Teachers Think Systematically About Their Practice and Learn from Experience* mencakup: (a) Guru secara terus menerus menguji diri untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, (b) guru meminta saran dari pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk meningkatkan praktek pembelajaran.
- 5) *Teachers are Members of Learning Communities* mencakup: (a) guru memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi dengan kalangan profesional lainnya, (b) guru bekerja sama dengan tua orang siswa, (c) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber daya masyarakat. (lihat <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>)

Sebagai seorang profesional, guru dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, memberi teladan, melatih, menilai, dan mengevaluasi dituntut memiliki kemampuan yang tidak hanya terbatas pada penguasaan keilmuan (*knowledge*) semata, tapi kemampuan merencanakan, pemahaman terhadap peserta didik, pemilihan metode, strategi, serta kesukses mengevaluasi pembelajaran menjadi persyaratan mutlak menjadi guru profesional.

Bagi Oemar Hamalik, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi: 1) memiliki bakat sebagai guru, 2) memiliki keahlian sebagai guru, 3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, 4) memiliki mental yang sehat, 5) berbadan sehat, 6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, 7) guru adalah manusia berjiwa Pancasila, dan 8) guru adalah seorang warga negara yang baik (Oemar Hamalik, 2001: 118). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1) kompetensi pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. Kompetensi pedagogik yang dimaksud dalam tulisan ini yakni antara lain kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan pembelajaran yang mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek yang diamati, yaitu:

- Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

- Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam proses tersebut terkandung multi peran dari guru.

Peranan guru meliputi banyak hal, yaitu guru dapat berperan sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan belajar, perencana pembelajaran, supervisor, motivator, dan sebagai evaluator.

Sebagai guru profesional, guru dituntut memiliki empat kemampuan dasar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 tentang Guru. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Kompetensi pedagogik* merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) evaluasi proses dan

- hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. *Kompetensi kepribadian* sekurang-kurangnya mencakup (1) berakhlak mulia, (2) arif dan bijaksana, (3) mantap, (4) berwibawa, (5) stabil, (6) dewasa, (7) jujur, (8) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (9) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (10) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
 3. *Kompetensi sosial* merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (1) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (2) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (3) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (4) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (5) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
 4. *Kompetensi profesional* merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurang meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Keempat kompetensi tersebut di atas bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*diciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*); (c) penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

B. Hakikat Pedagogik

Kata "*pedagogi*" berasal dari Bahasa Yunani kuno *paidagōgeō*; dari kata *país*: anak dan *ági*: membimbing; secara literal berarti "membimbing anak". Sementara menurut Webster, *pedagogy* berarti *the art, science, or profession of teaching* (seni, ilmu pengetahuan, atau profesi mengajar). Pedagogik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *paedos* yang berarti anak dan *agogos* yang berarti mengantar, membimbing, atau memimpin. Pedagogik merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, cara menghadapi anak didik, apa yang tugas pendidik dan tujuan mendidik anak itu sendiri. Prof. Dr. J. Hoogveld salah satu tokoh pendidikan di Belanda mengungkapkan bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak kearah tujuan tertentu agar ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Istilah pedagogik dikaitkan dengan 2 istilah lain, yakni *pedagogia* dan *pedagogi*.

Namun ketiganya memiliki perbedaan arti namun memiliki tujuan yang sama yakni 'anak'.

Pedagogi terbentuk dari kata *paedagogos* yang berarti 'Orang', pada zaman Yunani kuno *Paedagogos* adalah orang (pelayan atau pembantu) yang bertugas mengantar dan menjemput anak majikannya ke sekolah selain itu *paedagogos* juga bertugas membimbing anak majikannya. Namun istilah 'pelayan atau pembantu' tersebut mengalami pergeseran makna menjadi 'pendidik atau ahli didik'. Sedangkan *Pedagogia (Paedagogia)* berarti pergaulan dengan anak-anak. *Pedagogik* memiliki peranan penting dalam praktik pendidikan dengan alasan bahwa *pedagogik* merupakan landasan bagi praktik pendidikan anak, *pedagogik* dipercaya menjadi kriteria keberhasilan praktik pendidikan anak (Syaripudin dan Kurniasih, 2014: 2).

Di Yunani Kuno, kata *παιδαγωγός* biasanya diterapkan pada budak yang mengawasi pendidikan anak tuannya. Termasuk di dalamnya mengantarnya ke sekolah (*διδασκαλείον*) atau tempat latihan (*γυμνάσιον*), mengasuhnya, dan membawakan perbekalannya (seperti alat musiknya). (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagogi>). Dalam bahasa Yunani, *paedagogy*, memiliki arti *seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh seorang pelayan*. Dalam sejarahnya, di Yunani terdapat seorang anak yang setiap harinya diantar dan dijemput oleh seorang pelayan untuk mendapatkan pengetahuan dari sekolah. Proses itu kemudian dikenal dengan istilah *paedagogy*. Pelayan yang mengantar dan menjemput anak tersebut dinamakan *paedagogos*, yang secara harfiah merupakan gabungan 2 (dua) kata, yakni *paedos* yang berarti anak dan *agoge* yang berarti "saya membimbing" atau "memimpin". Meskipun istilah *paedagogos* awalnya berarti pelayan atau pelayanan, tetapi pada perkembangan selanjutnya, *paedagogos* dimaknai dengan seseorang yang tugasnya membimbing anak pada masa pertumbuhannya sehingga menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab (Zurinal, 2007: 1).

Dilihat dari akar katanya, *pedagogy* berarti usaha yang ditunjukkan seseorang untuk melakukan proses bimbingan kepada seorang anak dalam rangka mengarahkan, memberikan pelajaran sehingga lebih dewasa dalam penguasaan ilmu pengetahuan, bersikap, dan bertanggung jawab. Istilah *pedagogy* tersebut sebenarnya memiliki padanan makna yang sama dengan istilah *education* (Inggris), *educate* (Romawi), yang berarti "mengeluarkan

sesuatu yang berada di dalam atau memperbaiki moral dan melatih intelektual”, *Training* (Inggris), pelatihan, dan pendidikan dalam Bahasa Indonesia (Suwarno, 2006: 19).

Dalam kajian dan pemikiran pendidikan ada dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagogik. Pedagogi berarti pendidikan dan pedagogik artinya ilmu pendidikan (Fuad Ihsan, 1996: 1).

Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari kata *pedagogia* (Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan, lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Sedangkan istilah pedagogi dapat diartikan sebagai pendidikan, yang lebih menekankan pada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbing anak.

Pedagogik merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan objektif, mengembangkan konsep-konsep mengenai hakikat manusia, anak, tujuan pendidikan serta proses pendidikan. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah yang gelap sebagai “*terra incognita*” yakni daerah yang tak dikenal dalam lapangan pendidikan, karena masalah hakikat hidup dan hakikat manusia masih banyak diliputi oleh kabut misteri. (Uyoh: 2002: 43)

Paedagogik atau ilmu mendidik ialah suatu ilmu yang tidak hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya harus bertindak. Bagi pendidik, istilah pedagogik pasti sudah tidak asing lagi, dan ilmunya menjadi sebuah acuan dalam praktek mendidik anak. Lapangan pendidikan sebagai wilayah yang sangat luas, ruang lingkungannya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran tentang pendidikan. Pada dasarnya setiap orang pernah mendengar tentang istilah pendidikan, dan mengalami proses tersebut ketika masih kecil, dan setiap orang tua maupun guru, telah melaksanakan pendidikan. Namun tidak setiap orang mengerti dalam arti yang sebenarnya apa pendidikan itu, dan tidak setiap orang mengalami pendidikan atau menjalankan pendidikan sebagaimana mestinya. Karena itu untuk memahami seluk-beluk pendidikan kita perlu mempelajari ilmu pendidikan.

Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak, pedagogik merupakan teori pendidikan anak. Pedagogik sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru khususnya guru Taman Kanak-Kanak dan Guru Sekolah Dasar karena mereka akan berinteraksi langsung dengan anak. Tugas seorang guru bukan hanya sebatas mengajar untuk menyampaikan, atau mentransformasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada anak-anak di sekolah, melainkan guru mengemban tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani atau kata hati anak, sehingga ia (Baca: anak) akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia, dan menghargai sesama manusia. Seorang guru juga harus dapat mengembangkan keterampilan anak dalam hidup bermasyarakat, sehingga anak mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup.

Pedagogik adalah ilmu praksis, artinya suatu kesatuan antara ilmu dan tindakan mendidik. Tindakan mendidik dapat diasumsikan sebagai objek sasaran dari tindakan yang dimaksud. Peserta didik (anak) diposisikan sebagai objek atau sasaran dari tindakan mendidik. Dalam pengertian yang ada, mendidik tidak lagi hanya dibatasi pada mendidik anak, namun mendidik mengarah pada semua proses yang berkaitan dengan perubahan perilaku seseorang, baik pada kategori anak maupun pada mereka yang sudah dewasa. Pengertian pedagogik tidak lagi dibatasi dan sudah memiliki arti yang sangat luas. Pedagogik tidak hanya ditujukan kepada anak, remaja, dan orang dewasa, tetapi juga mencakup dimensi pelatihan. Berkembangnya konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*) merupakan efek dari perubahan makna pedagogik yang berlaku sekarang.

Istilah lainnya yang sering disandingkan dengan *pedagogy* antara lain *andragogy*. Jika *pedagogy* difokuskan proses bimbingan kepada seorang anak, sementara *andragogy* dipahami sebagai pendekatan atau bimbingan yang ditujukan kepada orang dewasa. Dua istilah inilah yang kemudian mengilhami lahirnya istilah “pendidikan” di Indonesia. *Pedagogy* sering diidentikkan dengan pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari kata “didik” yang diawali dengan kata “pe” dan akhiran “an”, berarti proses melakukan pendidikan yang tidak pernah berhenti.

Sebagai suatu proses, pendidikan mengandung arti yang sangat heterogen. Pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Ramayulis, 2002: 1).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan Ramayulis, pendidikan merupakan pencapaian kedewasaan (jasmani dan rohani) yang dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) terhadap anak didik.

Beberapa definisi pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah : (Hery Noer Aly, 1999: 2-3).

- a. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
- b. M. J Langeveld mengemukakan bahwa pendidikan atau pedagogi adalah kegiatan membimbing anak manusia menuju pada kedewasaan dan kemandirian.
- c. Kingsley Price mengemukakan *education is the process by which the nonphysical possessions of a culture are preserved or increased in the rearing of the young or in the instruction of adult*. Pendidikan ialah proses di mana kekayaan budaya non-fisik di pelihara atau dikembangkan dalam mengasuh anak-anak atau mengajar orang-orang dewasa.

Abdurrahman al-Nahlawi mendefinisikan pendidikan antara lain (Abdurrahman al-Nahlawi, 1992: 30-31):

1. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa.
2. Mengembangkan seluruh potensi.
3. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan.
4. Dilaksanakan secara bertahap.

Menurut Abuddin Nata pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana dan bertujuan yang dilaksanakan oleh orang dewasa dalam arti memiliki bekal ilmu pengetahuan dan ketrampilan menyampaikannya kepada anak

didik secara bertahap, dan apa yang diberikan kepada anak didik itu sedapat mungkin dapat menolong tugas dan perannya di masyarakat, di mana kelak mereka hidup (Abuddin, 1997: 10).

Sedangkan Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan dengan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak (Dewantara, 1977: 20). Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Suwarno, 2006: 21).

Pendidikan pada hakikatnya mengandung sedikitnya 3 (tiga) unsur, yakni: mendidik, mengajar, dan melatih. Ketiga hal tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Mendidik menurut Darji Darmodiharjo menunjukkan usaha yang lebih ditunjukkan kepada pengembangan budi pekerti, hati nurani, semangat, kecintaan, rasa kesucilaan, ketaqwaan dan lain-lainnya.

Dengan demikian, kompetensi pedagogik guru berarti segenap kemampuan yang harus ditunjukkan guru ketika akan, sedang, bahkan setelah proses pendidikan dilaksanakan. Kompetensi tersebut merupakan kemampuan guru yang harus tercermin dalam proses pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Landasan kependidikan.

Guru yang berlatar belakang pendidikan keilmuan harus memiliki keahlian secara akademik dan intelektual. Merujuk pada sistem pengelolaan pembelajaran yang berbasis subjek (mata pelajaran), guru seharusnya memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan dengan subjek yang dibina. Selain itu, guru memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Secara otentik kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan ijazah akademik dan ijazah keahlian mengajar (akta mengajar) dari lembaga pendidikan yang diakreditasi pemerintah. Aspek tersebut mencakup penguasaan konsep tentang pendidikan, penguasaan metode, psikologi, dan pemahaman yang utuh tentang penerapan strategi pembelajaran.

2. Pemahaman terhadap peserta didik

Guru harus memiliki pemahaman terhadap psikologi perkembangan anak, sehingga guru dapat mengetahui dengan benar dan tepat pendekatan yang harus dilakukan pada anak didiknya. Guru dapat membimbing anak melewati masa-masa sulit dalam usia yang dialami anak, baik secara fisik maupun mental. Misalnya pada usia sekolah (SD - SMA) secara emosional mereka masih mengedepankan ego, disinilah tugas seorang guru dalam mengarahkan membimbing anak ke arah yang positif, karena tugas seorang guru selain sebagai pembimbing, juga sebagai orang tua di sekolah. Guru juga harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap latar belakang pribadi anak, sehingga ia dapat mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi anak untuk kemudian ditentukan solusi dan pendekatan yang tepat.

Pemahaman terhadap karakteristik siswa menjadi kebutuhan mendasar yang harus diperhatikan guru. Hal ini karena setiap anak memiliki gaya dan kecenderungan yang berbeda dalam merespon mengikuti pembelajaran. Keragaman karakteristik yang dimiliki siswa tersebut, tentu saja harus difikirkan satu langkah atau desain pembelajaran yang betul-betul dapat diterima dengan baik oleh peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang menjadi target dari pendidikan dapat tercapai.

3. Pemahaman terhadap Kurikulum

Guru dipahami sebagai pengembang kurikulum yang berada di tingkat sekolah. Salah satu tugas yang harus dilakukannya antara lain mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari Kompetensi Dasar (KD) dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus dan RPP merupakan pembelajaran yang terkait erat dengan tugasnya sebagai pengembang kurikulum. Silabus dan RPP harus dipersiapkan secara matang, sehingga arah pembelajaran sesuai dengan arah pencapaian kompetensi yang diinginkan.

4. Penguasaan *Teaching Skill*

Kaitan dengan penguasaan kemampuan mengajar (*teaching skill*), guru dituntut untuk menciptakan situasi belajar yang kreatif, aktif dan menyenangkan. Guru harus memberikan ruang yang luas bagi anak untuk dapat mengeksplor potensi dan kemampuannya,

untuk kemudian guru dapat melatih dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki para siswa. Melalui *teaching skill* guru diharapkan memiliki kemampuan untuk membimbing anak, menciptakan wadah bagi anak untuk mengenali potensinya dan melatih untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki siswa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuannya diantaranya dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dilakukan untuk mencari kelemahan dalam pembelajaran, baik dari segi pembelajaran maupun dari siswa yang kemudian dicarikan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar. Sehingga setelah dilakukan *treatment* hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai. Pada prinsipnya, dari semua aspek kompetensi paedagogik yang telah dikemukakan diatas dapat ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan alternatif solusi.

Bahkan, dalam menyelenggarakan pembelajaran, guru menggunakan teknologi sebagai media. Menyediakan bahan belajar dan mengadministrasikan dengan menggunakan teknologi informasi. Membiasakan anak berinteraksi dengan menggunakan teknologi.

5. Evaluasi hasil belajar

Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan meliputi perencanaan, respon anak, hasil belajar anak, metode dan pendekatan. Untuk dapat mengevaluasi, guru harus dapat merencanakan penilaian yang tepat, melakukan pengukuran dengan benar, dan membuat kesimpulan dan solusi secara akurat.

C. Guru Sebagai Pengembang Kurikulum

Kurikulum memiliki dua sisi penting, yaitu, (1) kurikulum sebagai dokumen dan (2) kurikulum sebagai implementasi. Kurikulum sebagai dokumen berfungsi menjadi pedoman bagi guru, sedangkan posisi kurikulum sebagai implementasi merupakan realisasi atau penerapan dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Jika ada kurikulum maka ada

pembelajaran, begitupun sebaliknya jika ada pembelajaran maka ada kurikulum. Dalam teori pengembangan kurikulum, keberadaan kurikulum dan pembelajaran (*instruksional*) dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah, terpadu, terintegrasi, dan saling melengkapi. Cara pandang demikian, kurikulum dilihat sebagai "*what is a program*" atau program apa saja yang harus dilakukan pihak sekolah selama kurun waktu yang sudah ditentukan, tri wulan, semester, atau setahun. Sementara pembelajaran (*instruksional*) harus dilihat sebagai "*how to program*" atau bagaimana cara sebuah program dilaksanakan secara efektif, sefesien sesuai target/tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, keduanya bisa dilihat secara parsial, tetapi memiliki peran dan fungsi yang saling terintegrasi satu sama lain. Keberhasilan keduanya, baik kurikulum maupun pembelajaran akan sangat bergantung pada figur sentral lembaga pendidikan, yakni guru.

Di dunia pendidikan guru merupakan titik sentral sebagai ujung tombak dilapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar-mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dan pribadi guru (Hamalik, 2009: 231). Mengingat pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas, guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya, suatu fase penting dalam upaya pengembangan kurikulum, di samping sebagai unsur penunjang administrasi secara keseluruhan.

Selanjutnya dalam proses pengembangan kurikulum peran guru lebih banyak dalam lingkup pengembangan kelas. Murray Print dalam Wina Sanjaya (2011: 28-29) mengemukakan peran guru dalam tingkatan tersebut sebagai berikut:

- 1) Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan dan mengembangkan kurikulum yang sudah ada. Sebagai implementer, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum, guru tidak memiliki banyak kesempatan dalam menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran ini pernah dilaksanakan di Indonesia saat sebelum reformasi, yaitu guru sebagai implementator kebijakan kurikulum yang disusun secara terpusat, dituangkan dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Dalam GBPP yang berbentuk matrik telah ditentukan dari mulai tujuan

yang harus dicapai, materi pelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan, hingga alokasi waktu pelaksanaan.

Dalam pengembangan kurikulum guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Kurikulum bersifat seragam, sehingga apa yang dilakukan guru di Indonesia bagian timur sama dengan apa yang dilakukan guru di Indonesia bagian barat. Hal ini tentu sangat merugikan bagi daerah yang sudah memiliki tingkat prestasi siswa yang baik. Namun demikian, bagi daerah yang tertinggal akan sangat terganggu karena harus mengikuti daerah-daerah yang tingkat kemampuan, sarana dan sarana dan kemampuan gurunya sudah baik. Dengan terbatasnya peran guru di sini, maka kreatifitas guru dan inovasi guru dalam merekayasa dan mengaplikasikan pembelajaran tidak berkembang. Guru sudah dipastikan tidak akan ada motivasi untuk melakukan berbagai pembaruan, karena mereka menganggap bahwa mengajar hanya sebagai tugas rutin dan keseharian, dan bukan sebagai tugas profesional.

- 2) Guru sebagai *adapters*, artinya guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru diberi kewenangan untuk dapat menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013. Para perancang kurikulum hanya menentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SK/KI, KD), dan indikator minimal sebagai acuan minimal yang harus dicapai, bagaimana implementasinya, kapan waktu pelaksanaannya, bagaimana mengembangkan indikator pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru.
- 3) Guru sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, tetapi guru juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi dan visi sekolah/madrasah, serta sesuai

dengan pengalaman belajar yang diperlukan anak didik. Dalam KTSP dan Kurikulum 2013 peran ini dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal dan pengembangan indikator pencapaian agar mencapai tuntutan kompetensi dasar secara nasional.

- 4) Guru sebagai peneliti kurikulum (*curriculum researcher*). Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran ini guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian adalah metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yakni metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, PTK merupakan salah satu metode yang tidak hanya menambah wawasan guru dan menambah profesionalismenya, tetapi secara terus-menerus dapat meningkatkan kualitas kinerjanya.

Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 198) mengatakan, dilihat dari segi pengeluarannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pengembangan kurikulum, yang sentralisasi bersifat *uniform* untuk seluruh negara, daerah atau jenjang jenis sekolah.

Di Indonesia dewasa ini terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah digunakan modal ini. Kurikulum untuk sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah menengah umum, dan sekolah menengah kejuruan pada prinsipnya sama.

- 1) *Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum yang Bersifat Sentralisasi*

Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri atas para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu satu tahun, satu semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja.

Kurikulum untuk satu tahun disebut program tahunan, dan kurikulum untuk satu semester disebut dengan program semester. Sedangkan kurikulum untuk beberapa minggu, beberapa hari yang disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Program semester ataupun rencana pembelajaran memiliki komponen-komponen yang sama yaitu tujuan, bahan pelajaran, metode dan media pembelajaran dan evaluasi hanya keluasaan dan kedalamannya berbeda-beda. Tugas guru adalah menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat dan tahap perkembangan anak, memilih metode dan media mengajar yang bervariasi serta menyusun metode dan alat yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis dan rinci akan sangat memudahkan guru dalam implementasinya. Walaupun kurikulum sudah tersusun dengan terstruktur, tapi guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan dan penyesuaian-penyesuaian. Implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreatifitas, kecakapan, kesungguhan dan ketekunan guru. Guru juga berkewajiban untuk menjelaskan kepada para siswanya tentang apa yang akan dicapai dengan pengajarannya, membangkitkan motivasi belajar, menciptakan situasi kompetitif dan kooperatif serta memberikan pengarahan dan bimbingan.

2) *Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum yang Bersifat Desentralisasi*

Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah atau kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukan bagi suatu sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, isi daripada kurikulum sangat beragam, tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri tetapi kurikulum ini cukup realistis.

Bentuk kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain: pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah baik

kemampuan profesional, finansial dan manajerial. Ketiga, disusun oleh guru-guru sendiri dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Keempat, ada motivasi kepada sekolah (kepala sekolah, guru), untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya, dengan demikian akan terjadi semacam kompetisi dalam pengembangan kurikulum. Beberapa kelemahan kurikulum ini adalah: 1) tidak adanya keseragaman untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional, bentuk ini kurang tepat. 2) tidak adanya standar penilaian yang sama sehingga sukar untuk diperbandingkannya keadaan dan kemajuan suatu sekolah/wilayah dengan sekolah/wilayah lainnya. 3) adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa kesekolah/ wilayah lain. 4) sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. 5) belum semua sekolah/ daerah mempunyai kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

3) *Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum yang Bersifat Sentral-Desentral*

Untuk mengatasi kelemahan kedua bentuk kurikulum tersebut, bentuk campuran antara keduanya dapat digunakan yaitu bentuk sentral-desentral. Dalam kurikulum yang dikelola secara sentralisasi-desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga, peranan guru dalam pengembangan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru turut berpartisipasi, bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan/semester/atau rencana pembelajaran, tetapi juga di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Guru-guru turut memberi andil dalam merumuskan dalam setiap komponen dan unsur dari kurikulum. Dalam kegiatan yang seperti itu, mereka mempunyai perasaan turut memiliki kurikulum dan terdorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dirinya dalam pengembangan kurikulum. Karena guru-guru sejak awal penyusunan kurikulum telah diikutsertakan, mereka memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya, dengan demikian pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih tepat dan lancar. Guru bukan hanya berperan sebagai pengguna, tetapi

perencana, pemikir, penyusun, pengembang dan juga pelaksana serta evaluator kurikulum.

Sebuah kurikulum yang telah dikembangkan tidak akan berarti (menjadi kenyataan) jika tidak diimplementasikan, dalam artian digunakan secara actual di sekolah dan di kelas. Dalam implementasi ini, tentu saja harus diupayakan penanganan terhadap pengaruh faktor-faktor tertentu, misalnya kesiapan sumber daya, faktor budaya masyarakat, dan lain-lain.

Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksananya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya karena tanpa itu kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Sebaliknya pembelajaran tidak akan efektif tanpa kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian guru menempati posisi kunci dalam implementasi kurikulum.

Menurut Oemar Hamalik (2008: 237) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga membentuk dampak, baik berupa perbuahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai sikap. Sedangkan kurikulum menurut M. Joko Susilo (2007: 77) jangka waktu pendidikan yang harus ditempati oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Jadi implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dengan pengelolaan, sambil sementara dilaksanakan penyesuaian terhadap ortuasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya.

D. Tantangn Guru dalam Asean Economic Community (AEC)

Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dipahami sebagai pembentukan pasar tunggal meliputi aspek perdagangan barang atau jasa, serta tenaga profesional, seperti

dokter, pengacara, akuntan, guru, perawat dan lainnya di kawasan asia tenggara. Pada awalnya, MEA hanyalah sebuah organisasi regional yang bentuk kerjasamanya tidak longgar, namun dengan adanya *Asean Charter* maka Negara-negara Asean ini membentuk suatu masyarakat Asean yang mempunyai tiga pilar utama yaitu, *Asean Economic Community*, *Asean Security Community*, *Asean Socio-Cultural Community* dengan tujuan terciptanya stabilitas, perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan Asean. Tujuannya bagaimana menjadikan perekonomian di Asean menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara Asean saat ini, dan menjadikan posisi Asean menjadi lebih strategis di kancah Internasional. "Masyarakat Asean 2015 adalah Warga Asean yang cukup sandang pangan, cukup lapangan pekerjaan, dan pengangguran kecil tingkat kemiskinan berkurang melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang kongkrit."

Fenomena MEA tidak saja menghantui bidang perekonomian, tapi juga akan sangat berpengaruh terhadap jasa pendidikan. Guru profesional tidak lagi dapat diukur oleh penguasaan guru secara teoritik pada empat kompetensi yang sebagaimana diatur UU No. 14 tahun 2005, tetapi pembuktian secara praksis di lapangan apakah guru mampu menghadapi tantangan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang kian maju.

Guru sering diibaratkan sebagai figur yang menjadi panutan bagi peserta didik. Keberadaannya disebut juga sebagai pahlawan "tanpa tanda jasa". Posisinya, sedikit sudah melampaui peran orang tua (terlebih bagi yang super sibuk) dalam hal penyampaian materi ajar. Misalnya, dalam mengerjakan pekerjaan rumah "Anak-anak akan bersikukuh mengerjakan PR tersebut seperti yang diinstruksikan gurunya", padahal mungkin saja ada cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan PR tersebut. Ini menjadi bukti bahwa keberadaan guru menjadi sangat penting dan menentukan.

Kondisi tersebut menuntut guru menguasai kompetensi secara komprehensif dan berkelanjutan. Bukan hanya menyangkut penguasaan materi ajar yang dilakukan melalui *transfer of knowledge*, tapi menyangkut bagaimana cara menyampaikan materi dan bagaimana komunikasi dilakukan. Menjadi "panutan" bagi peserta didik tidaklah mudah, karena menyangkut persoalan keteladanan, contoh, dan pembiasaan dalam kesehariannya. Hanya guru

profesional yang dapat menjadi guru “panutan”, yakni (1) memiliki kompetensi, (2) bersertifikasi, dan (3) berkualifikasi S1.

Persoalan distribusi guru juga merupakan persoalan nyata yang dialami sekolah-sekolah di Indonesia. Menurut data yang dikeluarkan Ditjen PMPTK (2007) terdapat 16,22% guru *mismatched*. Dari lima bidang studi yang diteliti saat ini terdapat *mismatched* pada PKN 15,22%; Pendidikan Agama 20,80%; Tata Niaga 27,88%; Fisika 15,53%; dan Seni 52,93%. Secara nasional, persentase guru *mismatched* untuk semua jenjang pendidikan sebesar 36,43% (Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 13). Kondisi ini jelas-jelas akan berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas pendidikan secara nasional.

E. Profesioneliasme Guru

Guru dianggap sebagai “tokoh sentral” yang berperan penting dalam melahirkan generasi yang berkualitas. Karenanya, yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana maksimalisasi peran dan tugas guru dalam pendidikan terus dievaluasi dan dikembangkan seiring dengan aturan perundang-undangan. Tugas guru yang paling utama sebagaimana dijelaskan oleh S. Nasution menjadi tiga bagian. *Pertama*, sebagai orang yang mengkomunikasikan pengetahuan. Dengan tugasnya ini, maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan yang akan diajarkannya. Sebagai tindak lanjutnya dari tugas ini, maka seorang guru tidak boleh berhenti belajar, karena pengetahuan yang akan diberikan kepada anak didiknya terlebih dahulu harus ia pelajari. *Kedua*, guru sebagai model, yaitu dalam bidang studi yang diajarkan merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga guru tersebut menjadi model atau contoh nyata dari yang dikehendaki oleh mata pelajaran tersebut. Hal ini lebih nampak pada pelajaran bidang studi akhlak, keimanan, kebersihan, dan sebagainya. Jika guru sendiri tidak memperlihatkan keindahan dan manfaat mata pelajaran yang diajarkannya, jangan berharap anak-anak akan menunjukkan antusias untuk mata pelajaran itu. Guru yang tidak menunjukkan keberanian untuk berpikir intuitif, tidak akan dapat membina anak-anak yang mempunyai keberanian itu. *Ketiga*, guru juga menjadi model sebagai pribadi, apakah ia berdisiplin, cermat berpikir, mencintai pelajarannya, atau yang mematkan idealisme dan picik dalam

pandangannya. (S. Nasution, 1989: 14) Tugas dan peran guru tersebut yang kemudian mengantarkan pada satu istilah "pendidik profesional" dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. (UU RI no. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hal. 3-5).

Jika ketiga tugas tersebut dilaksanakan dengan baik oleh seorang guru, tidak mustahil peserta didik yang dihasilkan akan lebih baik, karena peserta didik melihat kinerja baik guru tersebut dan akan menjadi contoh mereka. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa seorang murid akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya dibandingkan orang tuanya. Oleh sebab itu, dibutuhkan guru profesional yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Istilah "profesi" sendiri berasal dari kata *profession* yang berarti "pekerjaan". Profesi juga dipandang sebagai keseluruhan pengetahuan dan keterampilan teknis yang harus dikuasai untuk melakukan suatu pekerjaan, dan tidak ada hubungannya dengan persoalan etika yang melekat pada pekerjaan itu (Mochtar Buchori, 2001: 104).

Di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV, Pasal 8 dinyatakan, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya pasal 9 Bab tersebut menyatakan, bahwa kualifikasi akadeik sebagaimana dimaksud pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya pada pasal 10 ayat 1 dinyatakan, bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi yang diperoleh melalui profesi (UU GD, 2005: 9-10)

Dalam pandangan Islam, sebagaimana diwakili pemikir pendidikan Islam, seperti Imam al-Ghazali, menyebutkan bahwa ciri-ciri guru profesional adalah ketika guru memiliki sifat-sifat antara lain: 1) menerima segala problema peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah; 2) Bersikap penyantun dan penyayang (Q.S. *Ali Imran*, 3:15); 3) Menjaga kewibawaan dan kehormatannya

dalam bertindak; 4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama (Q.S. *al-Najm*, 53: 32); 5). Bersikap rendah hati ketika menyatu dengan kelompok masyarakat, (Q.S. *al-Hijr*, 15:88); 6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia; 7) Bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat kecerdasannya rendah, erta membinanya sampai pada taraf maksimal; 8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problema peserta didik; 9) Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya; 10) Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan tidak sesuai dengan masalah yang dipertanyakan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan; 12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya; 13) Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik; 14) Mencegah dan mengontrol peserta didik yang mempelajari ilmu yang membahayakan (Q.S. *al-Baqarah*, 2:195); 15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan kepada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat *taqarrub* (kedekatan) dengan Allah SWT. (Q.S. *al-Bayyinah*, 98:5); 16) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif), seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya, sebelum mempelajari ilmu *fardlu a'in* (kewajiban individual, seperti akidah, syari'ah dan akhlak), serta 17) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta didik (Q.S. *al-Baqarah*, 2:44, dan *al-Shaaf*, 61:2-3). (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir: 2006, 94-95)

Bagi Oemar Hamalik, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi: 1) memiliki bakat sebagai guru, 2) memiliki keahlian sebagai guru, 3) memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, 4) memiliki mental yang sehat, 5) berbadan sehat, 6) memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, 7) guru adalah manusia berjiwa pancasila, dan 8) guru adalah seorang warga negara yang baik (Hamalik, 2001: 118).

Berkaitan dengan kompetensi, ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni:

- a. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan.
- b. Kemampuan mengelola program belajar mengajar.
- c. Kemampuan mengelola kelas.

- d. Kemampuan menggunakan media / sumber belajar.
- e. Kemampuan menguasai landasan-landasan pendidikan.
- f. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar.
- g. Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran.
- h. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- i. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.
- j. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan mengajar (Kunandar, 2007: 58).

Dengan demikian, profesi adalah bidang kecakapan atau keahlian dalam melakukan suatu pekerjaan yang ditopang oleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap mental yang baik, sehingga keahlian tersebut tidak disalah-gunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Sementara Istilah profesional sendiri berarti "sebutan" bagi mereka (baca: guru) yang bekerja sesuai bidang keahlian, didukung dengan segenap kemampuan yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran, tanggung jawab akademik, serta integritas moral yang tinggi.

F. Tantangan Guru Profesional Menghadapi MEA

Sektor pendidikan merupakan tulang punggung menjadi penghasil SDM yang berdaya saing tinggi. Hal ini tentu saja menuntut kualitas tenaga pendidik di dalamnya menjadi lebih baik, agar bisa mencetak sumber daya manusia yang siap bersaing di era MEA tahun 2015. Secara kuantitas, kita tidak kekurangan guru dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Rasio antara jumlah guru dan siswa di Indonesia sudah mencapai 1 (satu) berbanding 25 (duapuluh lima). Sayangnya kita masih juga terjebak pada permasalahan pemerataan dan kualitas guru.

Mengubah ataupun memperbaiki tata kelola pendidikan perlu menjadi agenda yang mendesak untuk segera dilakukan pada pemerintahan yang baru. Sehingga ketika sistem pendidikan ini tertata dengan baik, maka guru dapat lebih berkonsentrasi kepada pemberian pelayanan yang terbaik kepada siswanya. Bagaimana setiap saat mereka dapat melakukan peningkatan profesionalismenya secara kolektif maupun mandiri.

Selanjutnya permasalahan kualitas guru setidaknya bersumber kepada dua hal, yaitu eksternal dan internal, kurangnya pelatihan bagi guru ataupun kurangnya kemauan guru untuk meningkatkan diri. Tidak sedikit guru kita bekerja tanpa pelatihan yang memadai, sedangkan beberapa lagi beralasan bahwa peningkatan kompetensi secara swadaya juga tidak mudah dikondisikan. Mengingat banyaknya beban guru dalam memenuhi kewajiban mengajarnya serta kegiatan administrasi lainnya. Akhirnya guru menghadapi murid dengan keadaan seadanya, minim atau bahkan tanpa inovasi-inovasi baru yang membuat murid menjadi lebih bergairah dalam belajar.

Artinya pendidikan yang diharapkan sebagai penghasil sumber daya manusia yang berkualitas harus terus berbenah. Seruan untuk menyadari bahwa investasi pada guru merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam pendidikan merupakan tema besar yang diusung oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) berkaitan dengan peringatan Hari Guru se-dunia, pada 5 Oktober 2014. UNESCO menyerukan negara-negara untuk berinvestasi secara serius pada guru.

Payung hukum untuk agenda itu sudah jelas. Pasal 75 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa profesi guru/dosen wajib memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya. Perlindungan itu meliputi peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, yang semestinya berjalan beriringan. Dengan anggaran pendidikan yang memadai, seharusnya pemerintah lebih mampu melaksanakan agenda peningkatan guru secara lebih berkualitas, berkelanjutan dan merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru.

Selain itu guru juga harus lebih berdaya untuk peningkatan dirinya secara swadaya, terutama bagi mereka yang telah menerima tunjangan profesi. Keadaan tersebut dapat didukung oleh sekolah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Sekolah dapat mendesain sendiri program-program pelatihan yang menjadi kebutuhan guru. Sikap, kemampuan dan kemauan guru untuk melakukan perubahan merupakan sebuah modal besar untuk peningkatan dirinya.

Meminjam istilah Maister (1997) dalam Tilaar (2006) yang menulis tentang *True Professionalism*, bahwa profesionalisme tidak

hanya sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, namun profesionalisme lebih merupakan suatu sikap (*attitude*). Seorang guru bukan hanya *highly skilled*, tetapi akan disebut profesional jika dia juga bertanggung jawab, inisiatif, serta menunjukkan komitmen personal terhadap kualitas pada pekerjaannya.

Persaingan di era MEA 2015 bukan hanya memberikan tempat kepada para ahli, namun juga bagi mereka yang mempunyai *attitude*. Ketrampilan dapat diajarkan secara cepat, namun pembentukan watak membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Siklus pembentukan watak harus terus berjalan beriringan. Bukan hanya di sekolah, namun juga di rumah dan di lingkungan. Kondisi demikian yang kini menjadi tuntutan untuk melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan.

G. MEA Menuntut Guru Lebih Profesional

Profesionalisme guru dapat ditunjukkan dengan wawasan keilmuan, sikap, perilaku, dan keterampilan; satu kompetensi yang erat kaitannya dengan kepribadian (*performance*), kemampuannya dalam proses pembelajaran, serta kemampuannya dalam berkomunikasi dengan institusi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan (baca: masyarakat, guru, siswa, dan orangtua). Dengan kata lain, istilah profesional atau ahli selain ditunjukkan dengan kecakapan dalam melakukan pekerjaan, berpengalaman, dan berpengalaman juga terkait dengan sikap mental yang lurus, jujur, adil, manusiawi, terbuka, objektif, berpandangan jauh ke depan, dewasa, mampu mengendalikan diri, dan berfikir sebelum berbuat. Penyebutan seorang profesional sangat bergantung pada kemampuan (*competency*) khusus yang dimilikinya, seperti seseorang yang memiliki kemampuan mendiagnosa, memberikan obat sesuai penyakit yang diderita, maka dengan kemampuannya tersebut masyarakat menyebutnya seorang "dokter", termasuk pada profesi yang lainnya (sebut saja akuntan, konseler, jurnalis/wartawan, guru dan lainnya).

Dalam konteks pendidikan nasional, tuntutan terhadap adanya guru profesional menjadi satu keharusan. Bukan semata-mata karena tuntutan peraturan perundang-undangan (UU Sisdiknas, PP tentang Standar Nasional, UU Guru dan Dosen, Permendiknas tentang Kompetensi dan Kualifikasi), tapi lebih karena adanya dorongan riil dan fakta adanya kebutuhan terhadap

esensinya mutu pendidikan itu sendiri. Dengan guru professional, kebutuhan lulusan dengan daya saing tinggi dapat terwujud.

Lahirnya kebijakan penerapan MEA di akhir 2015, selain memberikan peluang (*oppurtunity*) besar bagi guru untuk bersaing menunjukkan kelayakannya menjadi guru profesional, sekaligus membuktikan lembaga kependidikan negara mana yang lebih siap mencetak SDM berkualitas dengan segenap kompetensi sesuai kebutuhan wilayah di Asia Tenggara, tetapi bisa menjadi “petaka” bagi sebagian guru yang “tidak siap” menghadapi perubahan dan kemajuan.

Bagi Tillar (1999: 199), SDM yang berkualitas adalah SDM yang unggul, sadar dengan identitasnya. Abad modern dengan kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan suatu bentuk dunia baru, yaitu dunia tanpa batas (*borderless world*). Hal ini berarti komunikasi antar manusia menjadi begitu mudah, begitu cepat dan begitu intensif sehingga batas-batas ruang menjadi sirna. Lahirnya organisasi dunai (WTO), APEC, dan MEA menunjukkan betapa cepat komunikasi persoalan dunia lahir dan menjadi sebuah kesepakatan. Gelombang globalisasi telah mengubah semua aspek kehidupan manusia baik dalam kehidupan perdagangan, politik, sosial, budaya, serta hak-hak dan kewajiban manusia.

Dalam dunia modern, masyarakat yang dapat bertahan hidup (*survive*), bukanlah masyarakat yang cerdas secara akademik, bukan pula masyarakat yang kuat secara fisik, tetapi masyarakat yang paham terhadap “perubahan”. Artinya, guru yang tidak siap dengan kemajuan berarti guru yang tidak berusaha melakukan kreatifitas dalam pola pembelajaran, tertutup dengan kemajuan teknologi informasi, acuh terhadap kebutuhan peserta didik, bahkan tidak mau berusaha membuka ruang dialog dengan masyarakat pendidikan.

Jika lahirnya MEA dianggap sebagai dampak dari adanya globalisasi yang harus diterima, maka tampilan (profil) guru ke depan harus jauh lebih siap, baik dari sisi penguasaan konten materi ajar, *teaching skill*, pengelolaan kelas, serta kompetensi lain yang dibutuhkan masyarakat Asia Tenggara. Terkait hal ini Tilaar (2000: 2015) menawarkan sejumlah karakteristik profil guru masa depan, yaitu: *Pertama*, memiliki kepribadian yang matang dan berkembang (*mature and developing personality*). Di dalam tuntutan kepribadian tersebut, berarti seorang guru untuk masyarakat era global haruslah seorang profesional, tidak sembarang orang bisa menjadi guru, tidak

semua juga lembaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat melahirkan guru profesional. Karakteristik tersebut juga mengisyaratkan perlunya sebuah nilai karakter kuat yang harus melekat pada diri seorang. Jika dalam perspektif pendidikan Islam persyaratan utama guru itu harus memiliki *akhlak al-karimah* seperti, jujur, pemaaf, disiplin, bertanggung jawab, dan ikhlas itu semua sangat terkait langsung bahwa persyaratan utama dari profesi guru adalah “kepribadian” yang baik, dan itu semua harus dibentuk melalui proses pendidikan dan pengalaman yang bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seorang guru profesional yang akan menginspirasi anak didiknya pada ilmu pengetahuan haruslah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks MEA, seorang guru profesional haruslah sosok yang secara keilmuan “mumpuni” dalam bidang ilmu yang diajarkannya, mampu menerjemahkan yang tekstual dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini.

Ketiga, menguasai keterampilan (*skill*) untuk membangkitkan minat peserta didik. Sebelum pembelajaran dimulai bagaimana seorang guru mampu membangkitkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Kemahiran guru dalam membuka dan penutup sebuah pembelajaran, sangat terkait dengan target informasi edukatif yang akan diterima peserta didik.

Keempat, pengembangan profesi yang berkesinambungan. Karakteristik ini berarti bahwa profesi pendidik yang profesional merupakan suatu profesi yang berkembang terus menerus. Upaya melakukan peningkatan diri (*upgrading*) terhadap kemampuan melalui pelatihan, seminar, kuliah umum, dan workshop tentang pembelajaran, dan pendidikan secara umum perlu didukung semua pihak.

BAB IV

KONSEP, LANDASAN DAN MODEL KURIKULUM

A. Hakikat Kurikulum

Secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa latin, *curriculum* yang berarti kumpulan materi pelajaran yang harus dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan, tri wulan atau satu semester. Pengertian kurikulum tersebut sesuai dengan asal katanya "*courier*" (bahasa Prancis) yang berarti berlari, (S. Nasution, 1991: 9). Ada juga yang berpendapat kalau secara bahasa kata "kurikulum", berasal dari bahasa Perancis, '*courier*' yang artinya *to run*: berlari. Kurikulum dalam bahasa Yunani, diartikan 'jarak' yang harus ditempuh oleh pelari. maka kurikulum dalam pendidikan diartikan sebagai 'sejumlah' mata pelajaran yang harus ditempuh/diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah (Sudjana, 1991: 4). Dalam Bahasa Arab, istilah "kurikulum" diartikan dengan *Manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan (Muhaimin, 2009:1).

Kurikulum juga disebut sebagai proses pengajaran yang isinya terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dan sejalan dengan hal-hal yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu proses dalam kegiatan pendidikan tertentu. Dalam pengertian ini, kurikulum dipahami rancangan mata pelajaran bagi suatu kegiatan jenjang pendidikan tertentu dan dengan menguasainya seseorang dapat dinyatakan lulus dan berhak

memperoleh ijazah (Abuddin, 1996: 123). Secara tradisional kurikulum dapat diartikan sebagai mata pelajaran atau sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau disiplin ilmu tertentu, seperti kurikulum pendidikan Agama, Bahasa, IPA, IPS, yang harus diajarkan di sekolah. Namun dalam perkembangannya pengertian kurikulum mempunyai cakupan yang lebih luas kurikulum harus dipahami bukan hanya meliputi mata pelajaran atau mata kuliah, akan tetapi segala usaha lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan baik yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian, kurikulum harus mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan di lembaga formal, dimana pengalaman yang diberikan kepada siswa dilakukan melalui kegiatan di sekolah dan di luar sekolah, tetapi tetap dalam ruang lingkup kontrol dan tanggung jawab sekolah.

Lain halnya dengan Crow & Crow sebagai mana dikutip oleh Abuddin Nata bahwa kurikulum adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis yang diperlukan sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu. (Abuddin, 1991: 123) Sebaliknya, Saylor & Alexander yang dikutip S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum bukan sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, melainkan termasuk pula di dalamnya segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Lebih spesifik lagi, Hasan Langgulung mengartikan kurikulum dengan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olah raga, dan kesenian baik berada di dalam maupun di luar kelas yang dikelola oleh sekolah (S. Nasution, 1991: 9).

Dalam kegiatan pembelajaran, interaksi antara pendidik dengan peserta didik merupakan hal pokok dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Interaksi tersebut dapat berlangsung diberbagai lingkungan pendidikan. Pada prinsipnya setiap praktik pendidikan pasti memiliki komponen-komponen berupa metode, bahan ajar, penilaian dan tujuan yang hendak dicapai.

Sekolah sebagai salah satu lingkungan pendidikan yang bersifat formal merangkum semua komponen-komponen tersebut di dalam kurikulum. Konsep kurikulum berkembang seiring perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi. Dakir (2010: 2-3) mendefinisikan kurikulum sebagai program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang

diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Nengky & Evan (1967) kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Sedangkan William B. Ragan mengemukakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah.

Kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.

Beberapa ahli teori berpendapat seperti yang dikemukakan S. Nasution (2013:5) bahwa kurikulum bukan hanya meliputi semua kegiatan yang direncanakan, melainkan juga meliputi peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah pengawasan sekolah. Jadi kurikulum bukan hanya kegiatan kurikuler yang formal tetapi juga kegiatan yang tak formal atau sering disebut ekstra kurikuler (*co-curriculum* atau *extra-curriculum*).

Lebih lanjut S. Nasution juga mengemukakan kurikulum formal meliputi: (1) tujuan pelajaran, umum dan spesifik, (2) bahan pelajaran yang tersusun sistematis, (3) strategi belajar-mengajar serta kegiatan-kegiatannya, dan (4) system evaluasi untuk mengetahui sampai mana tujuan itu tercapai (2009: 5).

Bagi Lewis & Meil kurikulum dipandang sebagai seperangkat bahan pelajaran, rumusan hasil belajar, penyediaan kesempatan belajar, kewajiban dan pengalaman peserta didik. Sementara Taba memandang kurikulum sebagai hal yang mengandung suatu kenyataan mengenai maksud dan tujuan tertentu; memberi petunjuk tentang beberapa pilihan dan susunan isinya; menyuratkan pada pola belajar dan mengajar tertentu, baik karena dikehendaki oleh tujuan maupun susunan isinya, akibatnya kurikulum memerlukan suatu program pengevaluasian hasil-hasilnya (Supandi, 1896: 52).

Menurut Hilda Taba (1962) kurikulum disebut sebagai:

“A curriculum usually contains a statement of aims and of specific objectives; it indicates some selection and organization of content; it either implies or manifests certain patterns of learning and teaching, whether because the objectives demand them or because the content

organization requires them. Finally, it includes a program of evaluation of the outcomes"

Oliva (1997) mengatakan bahwa kurikulum adalah:

"we may think of the curriculum as a program, a plan, content, and learning experiences, whereas we may characterize instruction as methods, the teaching act, implementation, and presentation.

Oliva termasuk orang yang setuju dengan pemisahan antara kurikulum dengan pengajaran dan merumuskan kurikulum sebagai *a plan or program for all the experiences that the learner encounters under the direction of the school"*.

Kedua tokoh tersebut memandang bahwasanya kurikulum tidak hanya terbatas pada kumpulan materi pelajaran, tetapi cakupan kurikulum harus dipandang sebagai suatu yang holistik, meliputi konsep, perencanaan program, implementasi pembelajaran, hingga evaluasi hasil pembelajaran. Konsep kurikulum demikian, tentu saja akan sangat terkait dengan tujuan instruksional, pilihan metode yang harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, pengalaman belajar siswa, pelaksanaan evaluasi, hingga hasil yang diperoleh dari kegiatan pendidikan. Dengan demikian, kurikulum dapat didefinisikan sebagai perencanaan kegiatan atau dokumen tertulis yang meliputi strategi untuk mencapai tujuan.

J. Galen Saylor dan William M. Alexander, menjelaskan *The curriculum is the sum total of schools effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school.* Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak itu belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah.

Harold B. Albery cs. Memandang kurikulum sebagai *all of the activities that the provided for the students by the school.* Kurikulum adalah segala kegiatan yang disajikan oleh sekolah bagi para pelajar dan tidak diadakan pembatasan antara kegiatan di dalam dan di luar kelas.

Sementara B. Othanel Smith cs. mengartikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak, yang diperlukan agar mereka dapat berpikir dan berkelakuan sesuai dengan masyarakatnya. Senada dengan pendapat

tersebut, Alice Miel kurikulum meliputi segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah.

Hal ini sebagaimana definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) yang berbunyi: kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dalam studi Kependidikan Islam, istilah kurikulum menggunakan kata "*manhaj*" yang diartikan jalan terang atau jalan yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Jalan terang tersebut adalah jalan yang dilalui oleh pendidik dan guru latih dengan orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka. Namun demikian, Muhammad Al Toumy Al Syaibani, melihat kurikulum Islam berbeda dengan kurikulum pada umumnya. Kurikulum Pendidikan Islam mengandung makna sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar yang terencana secara sistematis dan berarah tujuan yang mencerminkan cita-cita dari para pendidik sebagai norma *drager* (pembawa norma) Islami.

Pendapat terakhir mengenai kurikulum ini berbeda dengan pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Perbedaan ini tampak terlihat dari segi sumber pelajaran yang termuat dalam kurikulum. Jika sebelumnya kurikulum (pendidikan) hanya terbatas pada kegiatan pengajaran yang dilakukan di ruang kelas, pada perkembangan selanjutnya pendidikan dapat pula memanfaatkan berbagai sumber pengajaran yang terdapat di luar kelas, seperti perpustakaan, museum, pameran, majalah, surat kabar, siaran televisi, radio, pabrik, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini para siswa dapat terus mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan lainnya yang terjadi di luar kelas.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, cakupan bahan pengajaran yang terdapat dalam kurikulum semakin luas dan semakin bertambahnya beban yang harus dipikul oleh sekolah. Dalam hubungan ini S. Nasution mengatakan bahwa luasnya cakupan kurikulum ini antara lain

disebabkan adanya tugas-tugas yang semula menjadi beban badan-badan lain kemudian dibebankan pada sekolah (S. Nasution, 1991: 10). Berdasarkan tuntutan zaman tersebut, para perancang kurikulum dewasa ini menetapkan struktur kurikulum ke dalam empat bagian:

1. Tujuan yang ingin dicapai oleh proses belajar mengajar
2. Isi atau mata pelajaran yaitu berisi pengetahuan, informasi-informasi, data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang merupakan bahan bagi penyusunan kurikulum yang isinya berupa mata pelajaran yang kemudian dimasukkan dalam silabus.
3. Metode atau cara menyampaikan mata pelajaran tersebut
4. Evaluasi yaitu metode atau cara melakukan penilaian dan pengukuran atas hasil pengajaran mata pelajaran tertentu. (Abuddin, 1997: 125).

Struktur kurikulum ini sama dan berlaku bagi semua jenis dan jenjang pendidikan, termasuk Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Dilihat dari segi peran dan orientasinya, kurikulum dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu kurikulum yang bercorak humanistik, rekonstruksi sosial, teknologis, dan akademis. Kelompok yang berorientasi pada humanistik berpendapat bahwa kurikulum seharusnya memberikan pengalaman kepada setiap pribadi secara memuaskan. Artinya, kurikulum sebagai proses yang memberikan kebutuhan bagi pertumbuhan dan integritas pribadi seseorang secara bebas dan bertanggung jawab (Jhon D.Mc Neil, 1988: 5).

Sementara bagi mereka yang berorientasi rekonstruksi sosial melihat kurikulum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kelompok yang berorientasi teknologis memandang kurikulum sebagai proses teknologis untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Karena sifatnya "dari atas", orientasi kurikulum demikian ini lebih merupakan sebuah "rekayasa" daripada kesadaran dan kebutuhan riil yang beragam di masyarakat bawah. Sedangkan bagi yang berorientasi akademik melihat kurikulum sebagai upaya peningkatan intelektual dengan cara memperkenalkan para siswa terhadap berbagai macam pelajaran yang terorganisir dengan baik (Jhon D.Mc Neil, 1988: 8).

Dengan demikian, secara teoritis kurikulum lebih merupakan kendaraan daripada materi, jadi ia dapat digunakan oleh siapa saja yang menghendaknya. Pengertian kurikulum ternyata sangat luas dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kurikulum tidak dapat diungkapkan dalam satu pendapat yang dianggap baku, karena semua pendapat tersebut memiliki alasan masing-masing dengan argumentasinya yang rasional. Mulai dari pemahaman sempit tentang kurikulum, yang berfokus hanya pada kumpulan mata pelajaran, hingga pada pemahaman luas tentang kurikulum, yang mencakup seluruh pengalaman siswa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap kurikulum, penulis sepakat dengan klasifikasi kurikulum menurut Hamid Hasan (1988). Menurutnya, konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

1. kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.
2. kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.
3. kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.
4. kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Dari pendapat-pendapat tentang kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan bagian dari suatu sistem pengelolaan yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, atau dengan kata lain, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses

pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Bentuk dan Orientasi Kurikulum

Dilihat dari implementasinya, secara garis besar kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kurikulum tertulis (*written curriculum*) dan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Kurikulum Tertulis merupakan dokumen kurikulum yang berisi aturan, pedoman atau garis-garis program pembelajaran yang sudah ditetapkan sekolah/madrasah dan pemerintah (daerah maupun pusat) untuk dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum tertulis ini biasanya berisi pedoman baku disepakati di wilayah tertentu atau berlaku secara nasional sehingga menjadi ketetapan dan standar baku di sebuah wilayah/negara. Secara nasional, wujud kurikulum tertulis tertuang ke dalam standar isi, kompetensi inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), dan pengembangan indikator minimal sebagai acuan guru dalam kegiatan pembelajaran. Keberadaannya mutlak harus seragam dan sama sebagai wujud dari target ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Wujud lain dari kurikulum tertulis dapat berupa silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), baik yang dikembangkan oleh pemerintah maupun pendidik sendiri. Dengan kata lain, kurikulum tertulis dapat diterjemahkan sebagai sebuah dokumen kurikulum yang *given* sudah dipersiapkan pemerintah ataupun kurikulum yang menjadi pengembangan atau distingsi sekolah/madrasah. Hal ini sebagaimana rambu-rambu yang tertuang dalam Permendikbud No. 61 tahun 2014, setiap sekolah/madrasah minimal melengkapi tiga dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),¹ kurikulum operasional yang

¹Istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (1) kurikulum yang menjadi kebijakan pemerintah pada tahun 2006 dengan berpijak pada beberapa aturan perundang-undangan seperti UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta acuan pelaksanaan berdasarkan pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Kurikulum 2006 lahir sebagai bentuk pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, satu kurikulum yang menitikberatkan pada keutuhan pencapaian kompetensi (baca: kognitif, afektif, dan psikomotorik) sebagai wujud reformasi pendidikan pada saat itu. Kurikulum 2006 sendiri bersifat desentralistik, yaitu bentuk pengelolaan kurikulum yang secara operasional dikembangkan dan disesuaikan oleh pihak satuan pendidikan masing-masing. Makna ke (2) KTSP dapat diartikan sebagai kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh, dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Dengan kata lain, penyebutan istilah KTSP sendiri tidak spesifik untuk “kurikulum 2006”, tetapi dapat juga diarahkan pada penyebutan kurikulum 2013 (kurtilas). Dari sisi semangat dan substansi implementasinya, kedua kurikulum tersebut secara teknis operasional

disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Komponen KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan; Buku II KTSP berisi silabus, dan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Penyusunan Buku I KTSP menjadi tanggung jawab kepala sekolah/madrasah, sedangkan penyusunan Buku III KTSP menjadi tanggung jawab masing-masing tenaga pendidik. Buku II KTSP sudah disusun oleh Pemerintah.

Kurikulum tertulis berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum terbaik yang diharapkan dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan. Kurikulum tertulis juga mencerminkan cita-cita besar yang menjadi idealitas lembaga pendidikan. Idealitas lembaga sebuah lembaga tergambar dari rumusan visi, misi, tujuan yang diharapkan. Visi yang menggambarkan cita-cita luhur harus menjadi penyemangat (*ruh*) lembaga pendidikan dalam menjalankan edukasi rutin di sekolah/madrasah. Kondisi ini tentu harus didukung oleh grand desain kurikulum yang terukur, dari target pencapaian lulusan (SKL), tujuan pembelajaran, materi pelajaran, hingga penerapan proses evaluasinya. Inilah yang disebut kurikulum ideal, kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis (*written curriculum*). Semakin ideal konsep kurikulum yang ditawarkan, maka semakin mengukuhkan sebuah lembaga pendidikan.

Sementara itu menurut Glatthor dalam Dede Rosyada, kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), yakni kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih definitif digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum yang dipelajari, namun mampu memberikan pengaruh dalam

sama-sama dikembangkan pihak sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) dengan tujuan agar koherensi ketercapaian kompetensi dapat terwujud dengan baik.

perubahan nilai, persepsi dan perilaku siswa (Dede Rosyada, 2003: 29).

Sejumlah pengalaman yang kita kenal dengan *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi merupakan pengalaman yang tidak direncanakan/diprogramkan, seperti mematuhi peraturan-peraturan sekolah, menjalankan ritual/acara keagamaan, mematuhi peraturan-peraturan lainnya. Razali (Wahidmurni, 2009: 2) menyebut kurikulum tersembunyi “karena aktivitas yang terlibat di dalam kurikulum ini tidak berstruktur, atau dengan kata lain tidak dirancang. Kebanyakan aktifitas kurikulum jenis ini berlaku di tempat pertemuan pelajar seperti pusat sukan, asrama, kantin, perpustakaan. Kurikulum tersembunyi ini dikenali sebagai *soft skills* atau kemahiran insaniah. Elemen-elemen di dalam kurikulum ini dizahirkan dan mempunyai suatu sistem dan struktur yang sistematis dan professional. Antara nilai atau kualiti yang dikategorikan sebagai kemahiran insaniah di sini adalah kualiti kepemimpinan, kualiti pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, kualiti daya pembelajaran, kualiti diri murni (tepat masa, hadir ke kelas, hantar tugas tepat janji dan lain-lain) dan kualiti kerja berpasukan”.

Hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum yang berkembang secara alamiah atau tidak direncanakan secara khusus. Menurut Krathwohl (1964:112), proses pembentukan dan pengembangan nilai-nilai pada anak didik itu ada lima tahap.

- a) *Receiving* (menyimak dan menerima). Dalam hal ini anak menerima secara aktif, artinya anak telah memilih untuk kemudial menerima nilai. Jadi pada tahap ini anak baru menerima saja.
- b) *Responding* (menanggapi). Pada tahap ini anak sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif. Dalam hal ini ada tiga tahapan sendiri, yakni *manut* (menurut), bersedia menanggapi, dan puas dalam menanggapi.
- c) *Valuing* (memberi nilai), pada tahap ini anak sudah mulai mampu membangun persepsi dan kepercayaan terkait dengan nilai yang diterima. Pada tahap ini ada tiga tingkatan yakni : percaya terhadap nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai dipercayai, dan memiliki keterkaitan batin dengan nilai yang diterima.
- d) *Organization*, dimana anak mulai mengatur sistem nilai yang ia terima untuk ditata dalam dirinya dalam konteks perilaku.

- e) *Characterization*, atau karakterisasi nilai yang ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk mengorganisir sistem nilai yang diyakininya dalam hidupnya yang serba mapan, ajek, dan konsisten.

Walaupun kurikulum tersembunyi memberikan sejumlah besar pengetahuan pada siswa, ketidaksamaan yang diakibatkan kesenjangan antar kelas dan status sosial sering menimbulkan konotasi negatif. Sebagai cara dari kontrol sosial, kurikulum tersembunyi mempromosikan persetujuan terhadap nasib sosial tanpa meningkatkan penggunaan pertimbangan rasional dan reflektif.

Kurikulum tersembunyi dapat juga diasosiasikan dengan penguatan ketidaksetaraan sosial, seperti terbukti dalam perkembangan hubungan yang berbeda terhadap modal yang berdasar pada jenis kerja dan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan yang diterapkan pada siswa jadi berbeda-beda berdasarkan kelas sosialnya.

Sumber kurikulum tersembunyi sangat beragam, termasuk struktur sosial dari ruang kelas, latihan otoritas guru, aturan yang mengatur hubungan antara guru dan siswa, aktivitas belajar standar, penggunaan bahasa, buku teks, alat bantu audio-visual, berbagai perkakas, arsitektur, ukuran disiplin, daftar pelajaran, sistem pelacakan, dan prioritas kurikulum. Keragaman dalam sumber ini menghasilkan perbedaan yang ditemukan saat membandingkan suatu kurikulum tersembunyi dihubungkan dengan berbagai kelas dan status sosial.

Sementara materi aktual yang diserap siswa melalui kurikulum tersembunyi adalah sangat penting, orang yang menyampaikannya menghasilkan investigasi khusus. Hal tersebut terjadi terutama pada penyampaian pelajaran sosial dan moral dengan kurikulum tersembunyi, karena karakteristik moral dan ideologi guru dan figur otoritas lainnya diterjemahkan dalam pelajaran mereka, walau tidak disadarinya.

C. Langkah Pengembangan Kurikulum

Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, dimana

pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan guru. Ada 3 langkah komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum, yakni: 1) perencanaan, 2) implementasi, dan 3) evaluasi kurikulum.

1. Perencanaan kurikulum

Perencanaan kurikulum lebih spesifik dari pengembangan kurikulum. Perencanaan petunjuk kurikulum, analisis materi instruksional, pengembangan unit-unit instruksional, dan materi pelajaran terstruktur; kesemuanya itu menuntut perhatian akan elemen-elemen yang merupakan kunci dalam kurikulum ialah: isi atau kegiatan, organisasi dan evaluasi. Para ahli kurikulum yang berkecimpung dalam desain menganalisis konsentrasi dan keterkaitan yang terdapat di antara elemen-elemen itu. Hal itu dilakukan baik untuk keseluruhan program, untuk suatu kelas ataupun untuk suatu bidang studi.

Proses pengembangan kurikulum adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan pengembangan kurikulum merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan yang di dalamnya harus mengandung unsur perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Mengembangkan kurikulum yang dimulai dari kurikulum yang sudah ada, berarti melakukan evaluasi terhadap kurikulum tersebut. Selanjutnya, melakukan perencanaan, kemudian implementasi. Hal ini pada dasarnya merupakan kerangka dasar pengembangan kurikulum.

Kerangka dasar Perencanaan. Pengembangan kurikulum pada proses perencanaan dimulai dengan mengembangkan pedoman atau menetapkan bahan untuk kurikulum sekolah, yakni (1) menetapkan tujuan; (2) mengidentifikasi bahan yang cocok; dan (3) pemilihan strategi belajar mengajar.

Perhatian yang besar bukan hanya ditujukan terhadap fungsi analisis disain, tetapi juga terhadap kreasi kurikulum. Secara tradisional biasanya didahului dengan asumsi, kemudian tujuan, dilanjutkan dengan pemilihan isi atau kegiatan untuk mencapai

tujuan, dilanjutkan dengan pemilihan isi atau kebiatan untuk mencapai tujuan. Isi atau kegiatan itu diorganisasikan sedemikian rupa dengan lingkungan sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik yang kemudian diikuti dengan evaluasi dengan tujuan untuk revisi bila diperlukan.

2. Implementasi Kurikulum

Implementasi diartikan sebagai “upaya pengaturan” kekhususan desain melalui berbagai saluran kepada guru dan kelas. Konsepsi implementasi yang lain ditujukan langsung kepada proses mengajar dan instruksional. Implementasi dihubungkan dengan pengajaran, tetapi melupakan dampak multidimensional dan perubahan yang kompleks. Fullan (1982) menyatakan bahwa kurikulum dapat mengalami perubahan dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) bahan: menggunakan alat pelajaran baru, bahan yang direvisi atau teknologi pendidikan; (2) strategi mengajar: praktek, kegiatan, strategi yang baru dari guru; dan (3) keyakinan atau pandangan: asumsi-asumsi, teori baru sesuai dengan perkembangan masyarakat, politik, dan sebagainya.

Menurut konsepsi yang lain ialah bahwa tujuan kurikulum tidak untuk mematikan karsa dan karya guru, tetapi sebaliknya guru itu dipandang sebagai orang yang menampakkan kreasi dan adaptasinya dalam menerapkan kurikulum. Dengan demikian implementasi bukan berarti mengikuti secara teratur melainkan mengembangkan kegiatan-kegiatan belajar berdasarkan pengetahuan yang berasal dari hubungan guru dengan peserta didik.

Unruh dan Unruh (1984) berpendapat bahwa implementasi bukan hanya sekedar melaksanakan atau tidak melaksanakan inovasi melainkan suatu proses yang berkembang dan terjadi dalam berbagai tingkat dan derajat. Dikemukakan selanjutnya bahwa implementasi terdiri atas lima dimensi yang menunjang inovasi program kurikulum, yaitu: (1) bidang studi atau materi (2) struktur organisasi (3) peran perilaku, (4) pengetahuan dan pengertian, serta (5) internalisasi nilai.

Dengan bidang studi dimaksudkan adalah materi dalam kurikulum, seperti: matematika, bahasa Indonesia, sejarah, IPA, dan sebagainya. Dalam konteks ini bidang studi mencakup urutan penyampaian materi, media yang dipergunakan (bahan tertulis, kata-

kata yang terucapkan, bahan-bahan audiovisual dan metode penyampaian) serta tes atau bentuk-bentuk penilaian peserta didik.

Struktur organisasi meliputi perubahan-perubahan dalam susunan situasi formal dan kondisi fisik: pengaturan dan penggunaan ruang, serta penugasan dan pengelompokan peserta didik.

Peranan yang berubah merupakan dimensi yang esensial dari implementasi suatu rencana kurikulum yang baru. Dalam perubahan ini termasuk semua peranan dalam hubungan-hubungan yang ada. Dalam implementasi ini tercakup gaya mengajar, tugas-tugas baru seperti tuntutan baru untuk merencanakan dan berinteraksi, hubungan yang baru antara guru dan supervisor atau antara guru dan peserta didik, dan keterampilan proses belajar yang harus diperoleh peserta didik.

Pengetahuan dan pengertian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan inovasi diperlukan pula, yakni falsafah, nilai-nilai, asumsi, ujuan, bidang studi, strategi implementasi, dan komponen-komponen lainnya terutama hubungan-hubungan peranan.

Internalisasi nilai sebagai dimensi yang kelima harus dikaitkan dengan keempat aspek khusus lainnya. Pemahaman nilai suatu inovasi secara global tidaklah memadai untuk dapat mengimplementasikannya, karena itu nilai dari berbagai dimensi perlu pula.

3. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui, menelusuri atau menjajaki keadaan dan kemajuan peserta didik dan praktek, materi ataupun program pendidikan. Evaluasi ini dapat menjadi titik awal, titik akhir maupun alat dalam pemantauan yang berkesinambungan dan pembahasan pendidikan. Tujuan dapat terbatas dan sempit dalam arti hanya member angka kepada peserta didik ataupun dalam arti luas yakni perbaikan program.

Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wright bahwa : "*curriculum evaluation may be*

defined as the estimation of growth and progress of students toward objectives or values of the curriculum"

Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan (*feasibility*) program. Sementara itu, Hilda Taba menjelaskan hal-hal yang dievaluasi dalam kurikulum, yaitu meliputi ; *"objective, it's scope, the quality of personnel in charge of it, the capacity of students, the relative importance of various subject, the degree to which objectives are implemented, the equipment and materials and so on."*

Pada bagian lain, dikatakan bahwa luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja dalam sistem kurikulum tersebut. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa.

Agar hasil evaluasi kurikulum tetap bermakna diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Dengan mengutip pemikiran Doll, dikemukakan syarat-syarat evaluasi kurikulum yaitu *"acknowledge presence of value and valuing, orientation to goals, comprehensiveness, continuity, diagnostics worth and validity and integration."*

Evaluasi kurikulum juga bervariasi, bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif, seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik dan lain-lain. Sedangkan, instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan, *questionnaire, inventori, interview, catatan anekdot dan sebagainya*

Evaluasi kurikulum memegang peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan

menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan.

Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. (disarikan dari Nana Syaodih Sukmadinata, 1997)

Selanjutnya, Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengemukakan tiga pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu: (1) pendekatan penelitian (analisis komparatif); (2) pendekatan obyektif; dan (3) pendekatan campuran multivariasi.

Di samping itu, terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya adalah Model CIPP (*Context, Input, Process* dan *Product*) yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti : karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja (*performance*) dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgment mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini dikembangkan oleh Stufflebeam (1972) menggolongkan program pendidikan atas empat dimensi, yaitu: *Context, Input, Process* dan *Product*. Menurut model ini keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Penjelasan singkat dari keempat dimensi tersebut adalah, sebagai berikut:

1. *Context*; yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti: kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan sebagainya.
2. *Input*; bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti: dokumen kurikulum, dan materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana dan pra sarana, media pendidikan yang digunakan dan sebagainya.

3. *Process*; pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi : pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain-lain.
4. *Product*; keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan, mencakup : jangka pendek dan jangka lebih panjang.

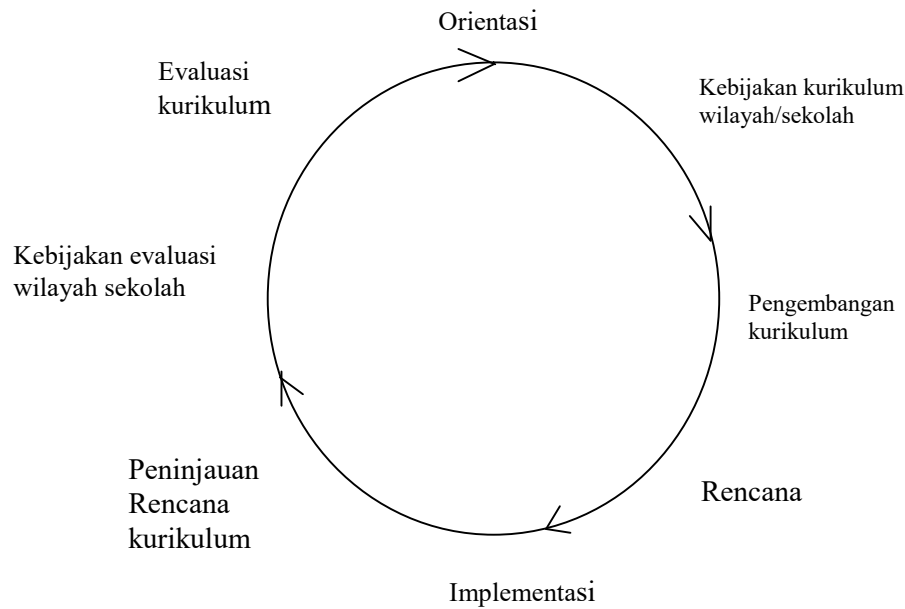
Menurut Saylor, Alexander, dan Lewis (1981), evaluasi adalah proses yang digunakan untuk menjajaki apakah pilihan-pilihan dalam kurikulum memadai atau tidak. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi kurikulum; apakah kurikulum mencapai tujuan yang telah direncanakan? Apakah tujuan itu sendiri valid? Apakah kurikulum sesuai dengan peserta didiknya? Apakah kegiatan yang dipilih merupakan yang terbaik mengingat tujuan yang akan dicapai? Apakah isinya sudah yang terbaik? Apakah materi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan instruksional sesuai dan yang terbaik dari yang ada?

Kerangka evaluasi. Evaluasi pada pengembangan kurikulum ini dimaksudkan sebagai proses yang kontinu dengan mengumpulkan dan mempertimbangkan sejumlah data untuk meningkatkan kurikulum lebih lanjut.

Dalam konteks pengembangan, pemanfaatan sebuah kurikulum juga tidak dapat dilepaskan dari kurikulum yang sudah ada, posisinya harus dimulai dari kurikulum yang sudah atau menekankan pada evaluasi kurikulum sebelumnya, sebelum melakukan perencanaan dan implementasi. Doll memberikan pengertian tentang evaluasi kurikulum, yakni usaha yang terus menerus dan menyeluruh untuk menyelidiki efek daripada program pendidikan yang dilaksanakan, baik isi maupun prosesnya. Secara komprehensif Doll mengatakan bahwa evaluasi sebagai proses yang menyeluruh dan memerlukan berbagai teknik sesuai dengan tujuan.

Dari pandangan tersebut, disimpulkan bahwa kurikulum secara keseluruhan perlu dievaluasi, sehingga para perencana, Pembina maupun pelaksana kurikulum mengetahui tentang ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses evaluasi kurikulum sebagai tonggak untuk melakukan pengembangan kurikulum dilukiskan pada bagan berikut:



Gambar tersebut menunjukkan bahwa kurikulum merupakan satu siklus kegiatan pengembangan yang harus terus dilakukan mulai dari proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Pembicaraan tentang kurikulum tentu saja akan sangat terkait dengan proses perencanaan, tujuan, isi, hingga proses evaluasi kurikulum. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Dilihat dari penjelasan tentang kurikulum tersebut tentu saja semua kegiatan yang terkait dalam proses pengembangan kurikulum, mulai perencanaan, implementasi, dan evaluasi harus dianggap sebagai bagian yang integrated. Ketiganya dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan memiliki posisi yang sama-sama penting.

D. Fungsi dan Peran Kurikulum

Fungsi kurikulum lebih menitikberatkan pada sejauhmana keberadaan kurikulum berdampak pada komponen lain dalam

penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, bagaimana fungsi kurikulum terkait dengan guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, bagaimana kurikulum memberikan rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan, bagaimana kurikulum menunjukkan distingsi sekolah sehingga membedakan dengan institusi pendidikan yang lain. Secara umum fungsi kurikulum sendiri berarti alat yang digunakan semua komponen pendidikan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dilihat dari fungsinya, kurikulum akan memberikan nilai kemanfaatan secara langsung pada peserta didik, pendidik, dan praktisi pendidikan.

Bagi peserta didik, kurikulum memiliki fungsi yang cukup signifikan, disamping sebagai pedoman proses kegiatan pembelajaran, kurikulum juga memberikan manfaat bagi peserta didik untuk melakukan proses penyesuaian dengan lingkungan/masyarakat, mendidik pribadi-pribadi yang tidak split persoanlity, menyiapkan peserta didik dengan kemajuan teknologi informasi yang sarat dengan kemajuan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Alexander English yang dikutip Wina Sanjaya (2010: 14-16) menyebutkan ada empat fungsi mendasar dalam kurikulum, yaitu:

a. Fungsi Penyesuaian

Karena individu hidup dalam lingkungan, sementara lingkungan senantiasa berubah dan dinamis, maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Di sinilah letak fungsi kurikulum sebagai pendidikan menuju individu yang *well adjusted*.

b. Fungsi, Integrasi

Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terinegrasi itu dapat memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.

c. Fungsi Deferensial

Kurikulum perlu meberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan hal ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Persiapan

Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan study lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih

lanjut atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang di inginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu program secara fleksibel.

e. Fungsi Diagnostik

Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal.

Keberadaan kurikulum juga sangat dirasakan guru terutama dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sebagai pengembang kurikulum operasional dengan tugas melaksanakan konsep-konsep kurikulum nasional, guru juga dituntut dapat memahami sepenuhnya tentang arti penting kurikulum. Sebagai pelaksana teknis pengembang kurikulum di sekolah, tugas pertama guru sebelum mengajar pertama-tama yang perlu dilakukan antara lain melakukan analisis Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar (KD),² dan menelaah silabus. Analisis kurikulum dilakukan untuk mengetahui kebutuhan lulusan yang terstandar secara nasional, sehingga arah pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, analisis awal tentang kebutuhan peserta didik perlu dilakukan, setelah itu baru melakukan pengembangan indikator pencapaian kompetensi, kemampuan minimal yang harus dicapai selama dan

² SKL dipahami sebagai kemampuan minimum yang harus dipenuhi oleh setiap lulusan satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap akhir pendidikan. Kemampuan minimum tersebut menyangkut ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Arah pengembangan SKL berarti penyiapan profil lulusan dengan keutuhan kompetensi personal, baik wawasan pengetahuan dan keterampilan, hingga kemampuan soft skill sebagai target akhir dari kegiatan pendidikan. Oleh karenanya dibutuhkan standarisasi kemampuan secara nasional (baca: SK untuk pengistilahan kurikulum KTSP dan KI untuk kurikulum 2013), menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude. Sebagai sebuah standar kemampuan yang berlaku universal, maka pemberlakuannya tidak lagi hanya melihat secara parsial konten mata pelajaran. Urusan Sikap atau tidak lagi menjadi otoritas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pancasila, dan Pendidikan Agama, penguatan keterampilan peserta didik tidak lagi hanya menjadi ranah mata pelajaran Seni Budaya dan Kesenian (SBK), tetapi seluruh mata pelajaran memiliki target yang sama menuju keutuhan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keberadaan SK/KI menjadi pengikat dari keseluruhan mata pelajaran, tanpa melihat titik perbedaan rumpun keilmuan.

setelah pembelajaran dilaksanakan. Indikator pencapaian kompetensi dapat berupa tahapan-tahapan aktifitas penciri yang dikembangkan dalam kerangka kebutuhan pencapaian KD. Kurikulum operasional harus dikembangkan berdasarkan sebuah kebutuhan, baik di sekolah, wilayah/daerah di mana proses pembelajaran berlangsung.

Bagi kepala sekolah, secara umum kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah. Pengembangan visi, misi, serta target pencapaian lembaga pendidikan berpatokan pada kurikulum. Pertama kali yang harus dipelajari kepala sekolah adalah tujuan lembaga yang akan dipimpinya, kemudian mencari kurikulum yang berlaku sekarang untuk dipelajari, terutama pada buku petunjuk pelaksanaan. Disamping tugasnya sebagai tenaga pendidik, kepala sekolah berperan sebagai pengawas (*supervisor*) pelaksanaan pendidikan sekolah/madrasah secara baik, kinerja guru, serta inovasi pengembangan kurikulum. Menurut Oemar Hamalik (1991) yang dimaksud dengan supervisi adalah semua usaha yang dilakukan supervisor dalam bentuk pemberian bimbingan, pengarahan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa.

Sementara bagi praktisi pendidikan atau penulis buku pendidikan, kurikulum menjadi pijakan untuk melakukan proses kreatifitas pengembangan bahan ajar. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun subpokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisis instruksional terlebih dahulu. Kemudian menyusun Garis-Garis Besar Program Pelajaran (GBPP) untuk mata pelajaran tertentu, baru mencari berbagai sumber bahan yang relevan. Perlu diingat bahwa tidak semua bahan dari berbagai sumber tersebut dapat ditulis sebagai bahan pelajaran. Yang perlu mendapat pertimbangan ialah kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Bahan hendaknya bersifat pedagogis, artinya bahan hendaknya berisikan hal-hal yang normatif.
- b. Bahan hendaknya bersifat psikologis, artinya bahan yang ditulis memperhatikan kejiwaan peserta didik yang menggunakannya. Bahan disesuaikan dengan perhatian, minat, kebutuhan, dan perkembangan jiwa anak.
- c. Bahan hendaknya disusun secara diktatis, artinya bahan yang ditulis tersebut dapat di organisir sedemikian rupa sehingga mudah untuk di ajarkan.

- d. Bahan hendaknya bersifat sosiologis, artinya bahan jangan sampai kontroversial dengan keadaan masyarakat sekitar.
- e. Bahan hendaknya bersifat yuridis, artinya bahan yang disusun jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem pendidikan nasional, maupun peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya.
- f. Bahan hendaknya memerhatikan perkembangan IPTEKS.

Kriteria penulisan bahan tentu saja disesuaikan dengan kelas-kelas yang bersangkutan. Bahan untuk sekolah dasar kriterianya akan lebih ketat daripada bahan untuk sekolah menengah. Sebaiknya bahan pelajaran dari suatu buku yang dijadikan buku wajib, hendaknya diambil dari buku yang ditulis oleh suatu tim yang isinya disahkan oleh yang berwenang.

E. Landasan dan Prinsip Kurikulum

Model kurikulum pendidikan sangat terkait dengan dasar atau landasan dalam proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari beserta cara mempelajarinya.

Proses pengembangan yang dilakukan para pengembang kurikulum bertujuan agar diperoleh sebuah "model" atau "desain" kurikulum yang nantinya dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pendidikan. Model kurikulum yang diinginkan tersebut tentu saja akan sangat bergantung pada acuan atau landasan yang menjadi pijakannya. Dalam pengembangan kurikulum, dikenal ada empat landasan, yaitu: 1) filosofis, 2) psikologis, 3) sosiologis, dan 4) IPTEK.

1. Landasan Filosofis

Filsafat (Indonesia) atau *philosophy* (Inggris) berasal dari bahasa Yunani *Philosophia*, yang terdiri dari akar kata *philos* (cinta) atau *philia* (persahabatan, tertarik kepada) dan *shopos* (hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelegensia). Kata "cinta" dalam falsafah menunjukkan adanya

usaha mendapatkan kebijaksanaan itu, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selain itu, berusaha mencari hakekat sesuatu, menghubungkan sebab dan akibat, serta menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Orang yang berfilsafat disebut *philosopher* dalam bahasa Inggris dan *failasuf* dalam bahasa Arab yang berarti orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaan filosof pada pengetahuan itu tercermin dalam pengabdianya secara total pada pengetahuan dan usahanya yang tak kenal putus asa untuk mengungkap kebenaran, dengan mengerahkan segenap kemampuan akal pikirannya. Sebagai indikasi kecintaannya pada pengetahuan, filosof secara terus menerus mencari kebenaran itu.

Oleh karena itu, secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran (*love wisdom*) (Amsal, 2004: 4). Sementara menurut Harun Nasution, filsafat itu sendiri sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia, maupun dalam bahasa Inggris *philosophy*, tapi lebih tepat dengan kata falsafa yang berasal dari bahasa Arab dengan wazan *fa'ala*, *fa'lala*, dan *fi'lal*. Oleh karenanya, kata benda dari *falasafa* seharusnya *falsafah* dan *filsaf*, yang berarti kebenaran dan kebijaksanaan (Harun Nasution, 1989: 9).

Secara terminologi, istilah filsafat lebih dipahami sebagai pengetahuan tentang alam semesta mengenai kebenaran dengan menggunakan akal budi dalam menyatakan, sebab akibat terjadinya sesuatu, asas hukum, dan sebagainya (Hasanudin, 2004: 265). Pengetahuan tentang alam berarti pengetahuan yang meliputi seluruh makhluk di alam raya, manusia, agama, pendidikan, dan lain sebagainya, yang harus dilakukan secara sistematis, terorganisir, melalui proses pemikiran mendalam (*optimal* atau *radikal*) yang tertuju pada upaya pemeriksaan dan penemuan. Bahkan pengertian filsafat secara lebih luas dapat dilihat pada pendapat Harold H. Titus dalam *Living Issues in Philosophy* yang mengemukakan pengertian filsafat tersebut mencakup berbagai hal sebagai berikut: (Harold H. Titus : 4-14)

1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan secara kritis terhadap kehidupan dan alam semesta.
2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi (*way of life*).
3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran tentang alam dan kehidupan di dalamnya secara keseluruhan; mencakup aspek metafisika (kosmologi dan ontology), etika (nilai etis, nilai

norma, nilai estetis), dan logika (sumber, alat, dan kriteria ilmu pengetahuan). Sistematis ini masing-masing menimbulkan berbagai macam aliran filsafat.

4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasan serta penjelasan tentang arti konsep.
5. Filsafat adalah sekumpulan problema yang bersifat fundamental, senantiasa meminta perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat.

Pengertian filsafat tersebut melahirkan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan istilah filsafat, antara lain: 1) berfilsafat berarti proses berfikir secara kritis, analitis, dan inovatif; 2) berfilsafat dilakukan secara komprehensif (menyeluruh), tidak parsial, dan terorganisir; 3) berfilsafat juga dapat diartikan sebagai proses mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi. Keragaman pengertian tersebut yang kemudian menimbulkan banyak cabang dalam filsafat, mulai dari filsafat yang bersifat metafisik, alam, agama, sosial, ilmu, hingga filsafat pendidikan, hal ini sejalan dengan berbagai persoalan yang selama ini muncul di hadapan kita.

Dari pengertian filsafat tersebut, landasan filosofis berarti suatu dasar, acuan yang berkaitan langsung dengan pemikiran, gagasan, ide, bahkan ideology yang menjadi acuan dalam proses pengembangan kurikulum. Ada dua hal yang berkaitan langsung dengan landasan filosofis tersebut, yakni: 1) landasan yang berkaitan langsung dengan pemikiran para filosof pendidikan atau dasar pijakan pemikiran yang bermuara pada hasil pemikiran para tokoh filsafat (*basic philosophy*). Sebagai implikasi dari pemikiran filosof tersebut kemudian melahirkan beberapa aliran dalam filsafat, misalnya aliran filsafat *idealism* (*perennialisme, essentialisme*), *progressivisme*, *eksistensialisme*, dan *rekonstruksi sosial*. 2) landasan filsafat yang berkaitan langsung dengan dasar (*ideologi*) sebuah negara (*national philosophy*). Bagi Zeis, pengembangan kurikulum harus dimulai dengan asumsi-asumsi filosofis sebagai sistem nilai (*value system*) atau pandangan hidup suatu bangsa. Falsafah negara dapat berperan menjadi satu landasan yang dijadikan acuan dalam mengembangkan kurikulum. Falsafah negara menjadi titik awal perbedaan kurikulum sebuah negara. Misalnya, falsafah Pancasila sebagai dasar negara dengan lima sila yang melekat di dalamnya, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta (5)

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia; berperan besar dalam menentukan arah kurikulum pendidikan di Indonesia.

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, semakin mengokohkan jati diri atau identitas bangsa Indonesia sebagai negara religius dan ketaatan tinggi pada nilai-nilai agama yang dianut masyarakat. Semua aturan, tata nilai, unsur keyakinan yang berkembang di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan sila pertama, termasuk dalam pelaksanaan pendidikan. Secara lebih spesifik, Pelaksanaan pendidikan Nasional bertujuan “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Target kecakapan yang lebih banyak bertumpu pada kemampuan hubungan manusia sebagai makhluk Allah SWT (*hablum minallah*), manusia dengan lingkungan dan masyarakat (*hablum minannas*). Tidak dapat dipungkiri, jika dalam implementasi kurikulum nasional nilai ajaran agama menempati posisi yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dalam aturan perundang-undangan Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a). pendidikan agama; b). pendidikan kewarganegaraan; c). bahasa; d). matematika; e). ilmu pengetahuan alam; f). ilmu pengetahuan sosial; g). seni dan budaya; h). pendidikan jasmani dan olahraga; i). keterampilan/kejuruan; dan j). muatan lokal”. Sementara Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: a). pendidikan agama; b). pendidikan kewarganegaraan; dan c). bahasa (lihat pasal 37 dan 38 UU No. 20 tahun 2003).

Begitu sentral, peran pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, semua jenjang pendidikan sekurang-kurangnya wajib memuat “pendidikan agama” sebagai basis penguatan terhadap nilai-nilai yang tertera dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa sekaligus menjadi *distingsi* bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya di dunia. Misalnya, pendidikan di Amerika Serikat dengan ideologi liberal berfikir bahwa pendidikan harus menyeluruh untuk pria dan wanita, orang kaya maupun miskin. Pendidikan juga tidak boleh mempersoalkan masalah perbedaan agama, ras, golongan, dan etnik. Sesuai paham kapitalis yang dianutnya, maka penyelenggaraan pendidikan di Amerika Serikat lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi didalamnya. Tiga Materi pelajaran yang diperlukan secara universal di Amerika Serikat antara lain: 1) *Science* (biasanya minimal dua

tahun; biologi, kimia dan fisika), 2) Matematika (biasanya minimal dua tahun: aljabar, geometri, aljabar II, atau precalculus/trigonometri), 3) bahasa Inggris (biasanya minimal empat tahun, termasuk sastra, humaniora), 4) Social Science (biasanya minimal tiga tahun, termasuk berbagai sejarah, ilmu pemerintahan/ekonomi), dan 5) Pendidikan Fisik (minimal satu tahun). Dalam konteks Amerika Serikat, pendidikan agama tidak menjadi urusan pemerintah (apalagi harus tertuang ke dalam sebuah aturan perundang-undangan), tetapi urusan individual yang tidak perlu diintervensi lebih jauh oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah.

Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang begitu kompleks. Melalui sila ini manusia dipandang sebagai makhluk sempurna dan paling mulia. Karena itu perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan dan ajaran agama itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh ummatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab juga bisa diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia (*human right*), hak sebagai warga negara yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Sebagai bangsa yang lahir atas dasar keragaman dan perbedaan budaya, etnis, suku, dan agama perlu adanya upaya saling menghargai, menghormati satu sama lain. Adanya persamaan derajat, saling mencintai, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah intisari dari penjelasan butir-butir pada sila ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pendidikan tidak hanya sekedar menghasilkan peserta didik dengan wawasan keilmuan yang luas, namun melalui proses pendidikan diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan diharapkan akan lahir generasi berkualitas dengan kecakapan keilmuan yang mumpuni, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai universalitas kemanusiaan, seperti tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awanu ala al-birri wal taqwa*), tidak saling mencela, tidak saling merendahkan, tidak saling membunuh, serta saling menghargai satu sama lain.

Untuk mencapai hasil tersebut dibutuhkan sistem pendidikan yang mendukung semua komponen pendidikan fokus pada pelaksanaan pendidikan yang manusiawi, berkedailan, dan berkedaban dengan iklim dan suasana pembelajaran kondusif yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam praktek pendidikan, ketiga sikap tersebut termanifestasi ke dalam sebuah pola pembelajaran yang humanis. Karena pada dasarnya, tujuan pendidikan pada hakikatnya “memanusiakan manusia”, bagaimana agar semua potensi dan bakat yang melekat pada diri manusia dapat diwadahi, baik fisik atau jiwa secara seimbang. Oleh karena itu, pembelajaran sebagai proses interaksi edukasi antara peserta didik dengan pendidik perlu dilakukan berdasarkan atas kebutuhan pada pengembangan semua potensi besar yang dimiliki peserta didik dengan tidak membedakan satu sama lain, baik secara gender, agama/keyakinan, kaya, miskin, perbedaan suku, maupun budaya.

Sila Persatuan Indonesia terkandung semangat patriotisme yang sudah ditunjukkan para pahlawan dalam heroiknya perjuangan kemerdekaan. Tanpa semangat patriotisme para pahlawan mustahil bangsa ini bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Semangat patriotisme tersebut terinspirasi dari rasa persatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan bangga terhadap bangsa. Statemen yang sering kita dengar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah.

Pendidikan merupakan wadah yang sangat tepat memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya nilai-nilai terkandung pada sila ke tiga ini. Lewat kurikulum yang memuat pendidikan sejarah sebenarnya implikasi nyata upaya pemerintah untuk mengenalkan sejarah perjuangan para pahlawan yang diilhami sila ketiga.

Sejarah perjuangan bangsa perlu diketahui untuk dasar menumbuhkan rasa cinta, rela berkorban, rasa persatuan dan kebanggaan terhadap tanah air. Pendidikan formal menjadi ring pertama yang bisa memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta didik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa semangat yang terkandung dalam sila ke tiga ini begitu rendah. Rasa cinta tanah air terganti dengan rasa cinta terhadap produk luar negeri. Bahkan nama-nama pejuang saja tidak banyak yang diketahui masyarakat apalagi memahami perjuangan sampai meneruskan amanat perjuangannya.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengajarkan kepada kita akan pentingnya praktek demokrasi dalam kehidupan. Setiap keputusan yang diambil harus bisa mengakomodir kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah menjadi cara penting dalam pengambilan kebijakan yang diperuntukan pada

kepentingan orang banyak. Setelah mengutamakan muswarah maka keputusan tersebut menjadi keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dalam konteks pelaksanaan pendidikan, keberadaannya harus dapat berkontribusi dalam membangun jiwa peserta didik, guru, dan civitas akademika sekolah yang lain untuk saling menghargai perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, praktek pembelajaran sering menggunakan prinsip sila keempat seperti diskusi, pembelajaran kooperatif sehingga lebih kreatif, tumbuh rasa kerjasama antara peserta didik.

Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” merupakan landasan dalam keadilan sosial yang seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara. Dapat dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa lepas dari berbagai interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Butir-butir dalam sila kelima diantaranya menjelaskan perlunya pengembangan sikap-sikap luhur cerminan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan. Terkait dengan kepribadian sangat penting mengembangkan sikap nyata dalam menghargai hak dan kewajiban orang lain, suka memberi pertolongan, menghindari sikap boros dan mewah. Akhir dari sila ke lima adalah terciptanya stabilitas sosial yang merupakan komitmen bersama dari masing-masing individu.

Pendidikan dilihat dari tujuannya terkait sila kelima adalah menciptakan rasa kesetiakawanan nasional. Kesetiakawanan nasional akan tercipta jika adanya rasa kekeluargaan, tolong menolong, saling menghargai, seperti termuat dalam sila ke lima.

Berdasarkan asas filosofis itulah, selanjutnya ditentukan tentang hakikat pengetahuan, sosiokultural, hakikat anak didik, dan teori-teori belajar. Bila ditentukan landasan-landasan sebagai fondasi kurikulum, maka ditentukan komponen-komponen kurikulum yang menyangkut tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, isi atau materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Jadi, pada dasarnya, proses pengembangan kurikulum adalah proses penyusunan keempat komponen tersebut yang dilandasi oleh asas-asas pengembangannya sebagai fondasi. (Sanjaya, 2009: 36-37).

Filsafat sebagai sistem nilai dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan, menentukan materi pelajaran yang harus diberikan, menentukan strategi pencapaian tujuan, dan menentukan tolok ukur keberhasilan pendidikan. Filsafat berarti upaya untuk

menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Landasan filosofis pendidikan, antara lain:

1. *Perennialisme* lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan dari pada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi ke masa lalu.
2. *Essensialisme* menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains dan mata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar-dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu.
3. *Eksistensialisme* menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Aliran ini mempertanyakan: bagaimana saya hidup di dunia? Apa pengalaman itu?
4. *Progresivisme* menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif.
5. *Rekonstruktivisme* merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme, peradaban manusia masa depan sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresivisme, rekonstruktivisme lebih jauh menekankan tentang pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya. Aliran ini akan mempertanyakan untuk apa berfikir kritis, memecahkan masalah, dan melakukan sesuatu? Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar dari pada proses.

2. Landasan Psikologis

Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar-individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda

dengan makhluk lainnya, karena kondisi psikologisnya. Manusia berbeda dengan benda atau tanaman, karena benda atau tanaman tidak mempunyai aspek psikologis. Manusia juga lain dari binatang, karena kondisi psikologis manusia jauh lebih tinggi tarafnya dan lebih kompleks dibandingkan dengan binatang. Berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks inilah sesungguhnya manusia menjadi lebih maju, lebih banyak memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dibandingkan dengan binatang (Syaodih, 2009:45).

Karena perbedaan tahap perkembangannya, latar belakang sosial-budaya, juga karena perbedaan faktor-faktor yang dibawa dari kelahirannya, maka kondisi psikologis setiap individu berbeda. Menurut Syaodih (2009:6) minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu Psikologi Perkembangan dan Psikologi Belajar. Keduanya sangat diperlukan, baik di dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, memilih dan menerapkan metode pembelajaran serta teknik-teknik penilaian.

Psikologi Perkembangan erat kaitannya dengan pembahasan teori atau pendekatan tentang perkembangan individu, yaitu pendekatan pentahapan (*stage approach*), pendekatan diferensial (*differential approach*), dan pendekatan ipsatif (*ipsative approach*). Menurut pendekatan pentahapan, perkembangan individu berjalan melalui tahap-tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan tahap yang lainnya. Pendekatan diferensial melihat bahwa individu memiliki persamaan dan perbedaan. Atas dasar persamaan dan perbedaan tersebut individu dikategorikan atas kelompok-kelompok yang berbeda (Syaodih, 2009:47-48).

Para ahli psikologi perkembangan banyak menganut pendekatan pentahapan. Pendekatan ini dipilih karena lebih jelas menggambarkan proses ataupun urutan perkembangan dan kemajuan individu. Selain itu, ada beberapa ahli yang mengkombinasikan suatu pendekatan dengan pendekatan yang lain. Kombinasi ini sering dipandang dapat memperlengkap deskripsi tentang perkembangan individu.

Menurut Syaodih (2009:48), Rousseau membagi seluruh masa perkembangan anak atas empat tahap perkembangan.

- (1) Masa bayi (*infancy*), usia 0-2 tahun merupakan tahap perkembangan fisik, menurut Rousseau sebagai binatang yang sehat.
- (2) Masa anak (*childhood*), usia 2-12 tahun, masa perkembangan sebagai manusia primitif.
- (3) Masa remaja awal (*pubescence*), usia 12-15 tahun, masa bertualang yang ditandai dengan perkembangan intelektual dan kemampuan nalar yang pesat.
- (4) Masa remaja (*adolescence*), usia 15-25 tahun masa hidup sebagai manusia yang beradab, masa pertumbuhan seksual, sosial, moral, dan kata hati.

Stanley Hall membagi keseluruhan masa perkembangan anak atas empat tahap.

- (1) Masa kanak-kanak (*infancy*), usia 0-4 tahun, merupakan masa kehidupan sebagai binatang melata dan berjalan.
- (2) Masa anak (*childhood*), usia 4-8 tahun, masa manusia pemburu.
- (3) Masa Puer (*youth*), usia 8-12 tahun, masa manusia belum beradab.
- (4) Masa remaja (*adolescence*), usia 12/13 tahun sampai dewasa, merupakan masa manusia beradab.

Robert J. Havighurst menyusun fase-fase perkembangan atas dasar problema-problema yang harus dipecahkannya dalam setiap fase. Tuntutan akan kemampuan memecahkan problema dalam setiap fase perkembangan ini oleh Havighurst disebutnya sebagai tugas-tugas perkembangan (*developmental tasks*). Havighurst membagi seluruh masa perkembangan anak atas lima fase:

- (1) Masa bayi (*infancy*) dari 0-1/2 tahun,
- (2) masa anak awal (*early childhood*) 2/3-5/7 tahun,
- (3) masa anak (*late childhood*) dari 5/7-masa pubesen,
- (4) masa adolesen awal (*early adolescence*) dari pubesen ke pubertas, dan
- (5) masa adolesen (*late adolescence*) dari masa pubertas sampai dewasa.

Untuk setiap fase, perkembangan Havighurst menghimpun sejumlah tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai anak. Dikuasai atau tidak dikuasainya tugas-tugas perkembangan pada suatu fase berpengaruh bagi penguasaan tugas pada fase-fase berikutnya.

Ada sepuluh kelompok tugas perkembangan yang harus dikuasai anak pada setiap fase yang membentuk pola, yaitu pola:

- (1) kebergantungan-keberdirisendirian,
- (2) memberi-menerima kasih sayang,
- (3) hubungan sosial,
- (4) perkembangan kata hati,
- (5) peran bio-sosio dan psikologis,
- (6) penyesuaian dengan perubahan badan,
- (7) penguasaan perubahan badan dan motorik,
- (8) belajar memahami dan mengontrol lingkungan fisik,
- (9) pengembangan kemampuan konseptual dan sistem simbol, dan
- (10) kemampuan melihat hubungan dengan alam semesta.

Pentahapan dari Piaget, Kohlberg, Erikson, dan sebagainya sifatnya lebih khusus. Jean Piaget mengemukakan tahap-tahap perkembangan dari kemampuan kognitif anak. Dalam perkembangan kognitif menurut Piaget, yang terpenting adalah penguasaan dan kategori konsep-konsep. Melalui penguasaan konsep-konsep itu, anak mengenal lingkungan dan memecahkan berbagai problema yang dihadapi dalam kehidupannya.

Ada empat tahap perkembangan kognitif anak menurut konsep Piaget, yaitu: (B.R. Hergenhahn & Matthew H. Olson, *Theories of Learning (Teori Belajar)*: 2008, h. 318-320)

- (1) *Tahap Sensorimotor, usia 0-2 tahun;* Tahap sensorimotor dicirikan oleh tidak adanya bahasa. Anak-anak pada tahap ini bersikap egosentris. Segala sesuatu dilihat berdasarkan pada kerangka referensi dirinya sendiri, dan dunia psikologi mereka adalah satu-satunya dunia yang ada.
- (2) *Tahap Praoperasional, usia 2-7 tahun;* Pada tahap ini, anak-anak mulai membentuk konsep sederna. Mereka mulai mengklasifikasi benda-benda dalam kelompok tertentu berdasarkan kemiripannya, tetapi mereka melakukan banyak kesalahan lantaran konsep mereka itu. Pada tahap selanjutnya, anak-anak memecahkan problem secara intuitif, bukan berdasarkan kaidah-kaidah logika.
- (3) *Tahap Konkret Operasional, usia 7-11 tahun;* pada masa ini anak mampu mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan (konservasi), kemampuan mengelompokkan secara memadai, melakukan pengurutan (mengurutkan dari

yang terkecil sampai paling besar dan sebaliknya), dan menangani konsep angka.

- (4) *Tahap Formal Operasional, usia 11-15 tahun;* pada masa ini, bisa menangani situasi hipotetis, dan proses berfikir mereka tak lagi tergantung hanya pada hal-hal yang langsung dan riil. Pemikiran pada tahap ini semakin logis.

Sementara psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Psikologi belajar mengkaji tentang hakekat belajar dan teori-teori belajar, serta berbagai aspek perilaku individu lainnya dalam belajar, yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus mendasari pengembangan kurikulum.

3. *Landasan Sosiologis*

Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan.

Dengan pendidikan, tidak diharapkan muncul manusia-manusia yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakatnya, tetapi justru melalui pendidikan diharapkan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem-sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai-nilai yang mengatur cara berkehidupan dan berperilaku para warga masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari agama, budaya, politik atau segi-segi kehidupan lainnya.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat maka nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut berkembang sehingga menuntut setiap warga masyarakat untuk melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tuntutan perkembangan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Perkembangan masyarakat juga tidak lepas dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil kemampuan berfikir manusia. Terciptanya produk-produk teknologi informasi

dan transformasi dengan segala kecanggihan dan efeknya merupakan bagian penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum.

Perkembangan ekonomi seperti penggunaan transaksi perdagangan melalui perbankan, pasar modal, asuransi juga merupakan bahan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum.

4. Landasan IPTEK

Ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu merupakan pengetahuan khusus dimana seseorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada lebih dahulu.

1. Objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada, atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni persesuaian antara tahu dengan objek, dan karenanya disebut kebenaran objektif; bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian.
2. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensi dari upaya ini adalah harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari kata Yunani "*metodos*" yang berarti: cara, jalan. Secara umum metodis berarti metode tertentu yang digunakan dan umumnya merujuk pada metode ilmiah.
3. Sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut

objeknya. Pengetahuan yang tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga.

4. Universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180° . Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat. Belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar ke-umum-an (*universal*) yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Karena itu untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial, harus tersedia konteks dan tertentu pula.

Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam dua dasa warsa terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal.

Selain itu, dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan melalui belajar sepanjang hayat dengan standar mutu yang tinggi. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai masyarakat sangat beragam dan canggih, sehingga diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan meta-kognisi dan kompetensi untuk berfikir dan belajar bagaimana belajar (*learning to learn*) dalam mengakses, memilih dan menilai pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan antisipatif terhadap ketidakpastian.

Landasan IPTEK dalam implementasi kurikulum dapat dilakukan melalui beberapa tindakan, yaitu:

- Pengembangan Topik-topik inti
- Dalam semua pokok-pokok bahasan pembelajaran dikembangkan dalam proses belajar mengajar berupa topik-topik inti yang berdasarkan IPTEK.
- Pemutakhiran isi kurikulum atas dasar pengembangan IPTEK .
- Pemanfaatan IPTEK sebagai salah satu pengembangan kurikulum memang harus diterapkan mengikuti jaman yang serba moderen. Pada hakekatnya inovasi kurikulum terus berjalan mengiringi

kemajuan jaman, sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu perkembangan IPTEK.

Pengembangan IPTEK bagi pengembangan program pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh guru melalui pemanfaatan media/sumber belajar, sistem penyampaian, pengembangan diawali dengan unit-unit belajar yang melibatkan berbagai langkah disertai dengan pengujian/uji coba diteruskan dengan unit-unit lain.

Selain landasan atau asas yang perlu dipertimbangkan dalam kurikulum, pengembangan kurikulum juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang disepakati. Prinsip dipahami sebagai ruh yang melekat kuat pada sebuah benda dan menjadi penciri dari seseorang. Ketika bicara tentang kurikulum, keberadaannya harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang mendasari.

Keberadaan kurikulum harus terintegrasi dengan filsafat, nilai-nilai, pengetahuan, dan pembuatan pendidikan. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Nana Syaodih dalam Pengembangan Kurikulum menyebutkan bahwa secara umum prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus (2011:150).

Ada beberapa prinsip umum dalam pengembangan kurikulum. *Pertama*, prinsip *relevansi*. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevan ke luar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi ke luar maksudnya tujuan isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat.

Kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memilih sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak.

Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.

Keempat, prinsip praktis. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Prinsip ini juga disebut prinsip efisiensi. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum jika menuntut keahlian-keahlian dan peralatan yang sangat khusus dan mahal pula biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan.

Kelima, prinsip efektifitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. (1) efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas. (2) efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan keberhasilan mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, kurikulum juga memiliki beberapa prinsip. Menurut Kunandar (2007: 142-143) dalam pelaksanaan kurikulum di setiap kesatuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum berdasarkan pada potensi, perkembangan, dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna baginya.

- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu:
 - 1) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Belajar untuk memahami dan menghayati;
 - 3) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif;
 - 4) Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain;
 - 5) Belajar untuk membangun dan menemukan jati dirinya, melalui proses pembelajaran yang efektif, kreatif, aktif, dan menyenangkan.
- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang baik;
- d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, hangat, dan bersifat membangun;
- e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, yang sumber belajar bersifat keteknologian;
- f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan, kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidik dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal;
- g. Kurikulum dilaksanakan berdasarkan komponen-komponen kurikulum yang ada.

Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di suatu lembaga pendidikan sangat mungkin terjadi penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda dengan kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lainnya, sehingga akan ditemukan banyak sekali prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum.

F. Model Kurikulum

Implikasi dari empat landasan di atas, kurikulum terus mengalami perubahan seiring dengan sifatnya yang fleksibel, dinamis, adaptif, dan inovatif. Dengan sifatnya tersebut, model kurikulum pun dapat dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu:

1) *Model Humanistik*

Dalam Kamus Wikipedia, humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul tahun 1950an sebagai reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologis. Permasalahan ini dirangkum dalam lima postulat Psikologi Humanistik dari James Bugental (1964), sebagai berikut:

- a) Manusia tidak bisa direduksi menjadi komponen-komponen.
- b) Manusia memiliki konteks yang unik di dalam dirinya.
- c) Kesadaran manusia menyertakan kesadaran akan diri dalam konteks orang lain.
- d) Manusia mempunyai pilihan-pilihan dan tanggung jawab.
- e) Manusia bersifat intensional, mereka mencari makna, nilai, dan memiliki kreativitas.

Abraham Maslow adalah satu diantara tokoh aliran humanistik yang percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang *Hierarchy of Needs* (Hierarki Kebutuhan). Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai yang paling tinggi (aktualisasi diri). Adapun hirarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 1). Kebutuhan fisiologis/ dasar; 2). Kebutuhan akan rasa aman dan tentram; 3). Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi; 4). Kebutuhan untuk dihargai; dan 5). Kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Humanistik merupakan paham yang memandang sebagai manusia [humanisasi], yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrahnya.³ Maka manusia sebagai makhluk hidup, ia harus mampu

³ Dalam pandangan Muzayyin Arifin, fitrah dipahami sebagai: (1) Kemampuan dasar untuk beragama Islam (Ad-Dinul Qayyimah), di mana faktor iman merupakan inti beragama manusia. Muhammad Abduh, Ibn Qayyim, Abu A'la Al-Maududi, Sayyid Quttub berpenadapat sama bahwa fitrah mengandung kemampuan asali untuk beragama Islam,

melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya. Maka posisi pendidikan dapat membangun proses humanisasi, artinya proses memanusiakan manusia, proses menghargai orang lain, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak untuk menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang, dan lain sebagainya.

Terkait dengan kurikulum, dalam pandangan humanistik fungsi kurikulum lebih pada upaya penyiapan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya (Hamalik, 2009: 144). Peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif;
2. Menghormati individu peserta didik; dan
3. Tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat.

Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Sehingga evaluasi kurikulum humanistik lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta didik di masa depan.

karena Islam adalah agama fitrah atau identik dengan fitrah. Ali Fikri lebih menekankan pada peranan heriditas (keturunan) dari bapak ibu yang menentukan keberagaman anaknya. Faktor keturunan psikologis (heriditas kejiwaan) orang tua anak merupakan salah satu aspek dari kemampuan dasar manusia itu.(2) Mawahib (bakat) dan qabiliyat (tendensi atau kecenderungan) yang mengacu kepada keimanan kepada Allah. Dengan demikian maka "fitrah" mengandung komponen psikologis yang berupa keimanan tersebut. Karena iman bagi seorang mukmin merupakan elan vitale (daya penggerak utama) dalam dirinya yang memberi semangat untuk selalu mencari kebenaran hakiki dari Allah; dan (3) Naluri dan kewahyuan (revilasi) bagaikan dua sisi dari uang logam, keduanya saling terpadu dalam perkembangan manusia. Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung, Fitrah dapat dilihat dari dua segi yakni: Pertama, segi naluri pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir, dan yang kedua, dapat dilihat dari segi wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi-nabi-Nya. Jadi potensi manusia dan agama wahyu itu merupakan satu hal yang nampak dalam dua sisi; ibaratnya mata uang logam yang mempunyai dua sisi yang sama. Mata uang itulah kita ibaratkan fitrah.

2) *Model Rekonstruksi Sosial*

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Hal ini sebagaimana ditegaskan Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan. ([wikipedia//org//masyarakat](http://wikipedia.org/masyarakat))

Theodore Brameld, pada awal tahun 1950-an menyampaikan gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Dalam masyarakat demokratis, seluruh warga harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal ini sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membangun individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial.

Para rekonstruksionis sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan murid-murid bagaimana masyarakat membuat warganya seperti yang ada sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksinis sosial menentang intimidasi, menakut-nakuti dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para siswa mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan kerja sama atau bergotong royong untuk memecahkannya.

Dalam konteks kurikulum, rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat,

politik perkembangan ekonomi. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial member komitmen yang tinggi pada ide sosial yang dibatasi oleh *consensus social*.

Dalam pandangan rekonstruksi sosial, problematika masyarakat yang setiap saat muncul sejalan dengan percepatan informasi, teknologi, ekonomi, politik, bahkan arus budaya mengharuskan setiap kurikulum pendidikan dapat memberikan tawaran solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Pendukung kurikulum rekonstruksi sosial yakin bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh pengetahuan sosial saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain (Hamalik, 2009: 146).

Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja keberadaan kurikulum yang ditawarkan seharusnya dapat menjawab segala persoalan tersebut. Kurikulum –sebagai sebuah konsep struktur kurikulum—sebaiknya berisi mata pelajaran yang pada akhirnya dapat menjawab segala persoalan tersebut. Jenis kurikulum tersebut dikenal sebagai model “*integrated curriculum*”.

Jenis kurikulum *integrated curriculum* adalah jenis kurikulum yang di dalamnya berisi mata pelajaran dengan mengintegrasikan beberapa nilai (karakter) positif yang diinginkan serta bertujuan untuk memberikan “jawaban” atas permasalahan dimaksud. *Integrated curriculum* berarti *multidisciplinary curriculum* dan *correlated curriculum*. *Integrated curriculum* merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran (Idi : 146). Bagi S. Nasution, kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak mempertimbangkan perbedaan individual peserta didik dan bertujuan agar peserta didik memperoleh sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Oleh karena itu, dalam implementasinya integrasi kurikulum harus tetap memperhatikan hal-hal berikut: 1) *child centered curriculum*; satu konsep kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, 2) *social functions curriculum*, kurikulum yang mencoba mengeliminasi mata pelajaran sekolah dari keterpisahan dengan fungsi-fungsi utama kehidupan sosial. dan 3) *experinece curriculum*.

Kurikulum yang mempertimbangkan pengalaman yang muncul ketika proses pembelajaran berlangsung.

3) *Model Teknologis*

Secara etimologis, akar kata teknologi adalah "*techne*" yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek, atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Istilah teknologi sendiri untuk pertama kali dipakai oleh Philips pada tahun 1706 dalam sebuah buku berjudul *Teknologi: Deskripsi Tentang Seni-Seni, Khususnya Mesin (Technology: A Description Of The Arts, Especially The Mechanical)*. (www.wikipedia.com)

Teknologi merupakan istilah atau sebutan produk tertentu yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan (*science*). Keberadaan teknologi juga menjadi ciri lain dari masyarakat modern. Perkembangan teknologi pada abad ini sangat pesat. Perkembangan teknologi tersebut mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang pendidikan. Sejak dulu pendidikan telah menggunakan teknologi, seperti papan tulis, kapur, dan lain-lain. Namun, sekarang seiring dengan kemajuan teknologi banyak alat (*tool*), seperti audio, video, overhead projector, film slide, dan motion film, serta banyak alat-alat lainnya.

Dalam pendidikan, teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Inti kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi bagi mereka. Teknologi seharusnya berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum, dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, sangat beralasan bahwa semakin banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi (Hamalik, 2009: 148-149).

4) *Model Subyek Akademik*

Kurikulum subyek akademik merupakan model kurikulum yang menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Ilmu dipandang sebagai konsep yang selalu berkembang, karenanya kurikulum hendaknya mengacu pada

disiplin ilmu yang ada. Keberadaan kurikulum model ini banyak dipengaruhi pemikiran klasik, seperti Perennialisme dan Esensialisme, berorientasi kepada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya.

Dalam pandangan Islam sendiri, hampir dapat dipastikan jika penerapan kurikulum yang digunakan mengacu pada pandangan yang dilontarkan pemikir muslim, seperti Al-Farabi,⁴ al-Ghazali,⁵ Ibnu Khaldun.

Dalam bukunya, *ihya' al-ulum*, al-Farabi membagi ilmu sebagai berikut:

1. Ilmu Bahasa (*ilmu al-lisan*), terdiri dari 7 bagian perkembangan, yaitu: a) ungkapan sederhana berupa kata-kata, b) ungkapan yang sudah tersusun, c) tata bahasa yang mengatur ungkapan

⁴ Nama lengkapnya Abu Na'ir Muhammad ibn Muhammad ibn Tarkhan ibn Uzlagh al-Farabi. Di kalangan orang-orang Latin Abad Tengah, al-Farabi lebih dikenal dengan Abu Na'ir (Abunaser/Avenaser), lahir di Wasij, distrik Farab (sekarang dikenal dengan kota Atrar), Turkistan pada tahun 257 H (870 M). Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Pada waktu mudanya, al-Farabi pernah belajar bahasa dan sastra Arab di Bagdad kepada Abu Bakar as-Sarraj, dan logika serta filsafat kepada Abu Bisyr Mattitus Ibn Yunus, seorang Kristen Nestorian yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan kepada Yuhana ibn Hailam. Kemudian ia pindah ke Harran, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhana ibn Jilad. Tetapi tidak berapa lama, ia kembali ke Bagdad untuk memperdalam filsafat. Ia menetap di kota ini selama 20 tahun. Di Bagdad ini, ia juga menulis dan membuat ulasan terhadap buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Yahya ibn Adi, filosof Kristen. (Lihat *Ensiklopedi Islam*. 1. ABA-FAR. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.t) h. 331)

⁵ Nama lengkapnya, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali, seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur. Ia lahir di kota Gazalah, sebuah kota kecil dekat Tus di Khurasan, yang ketika itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ia meninggal di kota Tus setelah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu dan ketenangan batin. Nama al-Ghazali dan al-Tusi dinisbahkan kepada tempat kelahirannya. Ayahnya seorang zahid, seorang peminta yang selalu memintal dan menjualnya sendiri di kota itu. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara. Ketika akan meninggal, ayahnya berpesan kepada sahabat setianya agar kedua putranya itu diasuh dan diberi pendidikan secara lebih layak. Sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayah al-Ghazali, kedua anak itu dididik dan di sekolahkan. Setelah harta pusaka peninggalan ayah mereka habis, mereka dinasehati agar meneruskan mencari ilmu semampunya. Sejak kecil Imam al-Ghazali dikenal sebagai anak pencinta ilmu pengetahuan. Pendidikannya dimulai dengan belajar al-Qur'an pada ayahnya sendiri, sepeninggal ayahnya ia dititipkan kepada teman ayahnya, Ahmad bin Muhammad al-Razikani, seorang sufi besar di Thusia. Padanyalah al-Ghazali mempelajari ilmu fiqih, riwayat hidup para wali, dan kehidupan spiritual mereka. Selain itu, ia belajar juga menghafal syair-syair tentang mahabbah (cinta) kepada Tuhan, al-Qur'an dan Sunnah. Ia dikenal sebagai seorang filosof, teolog, ahli hukum, dan sufi yang dikenal di Eropa dengan sebutan al-Gazel. (Lihat *Ensiklopedi Islam*. 1. ABA-FAR. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, t.t) h. 331)

- sederhana, d) tata bahasa yang mengatur ekspresi yang tersusun, e) tata menulis, f) tata berbicara, dan g) tata sastra.
2. Ilmu Logika terdiri dari: a) ilmu tentang katagori, b) interpretasi, c) priori analitis, d) posteriori analistis, e) pembuktian dealektis, f) sofistis reputasi, g) seni retorika, dan h) puisi.
 3. Ilmu matematika terdiri dari: a) aritmatika, b) geometri, c) optik, d) ilmu falak, e) musik, f) ilmu timbangan, dan g) ilmu rekayasa (engineering).
 4. Ilmu Fisika terdiri dari: a) dasar-dasar fisika benda, b) unsur-unsur benda, c) generasi dan perobahan benda, d) reaksi pertumbuhan kesenyawaan benda, e) sifat-sifat kesenyawaan benda, f) mineral, g) tumbuh-tumbuhan, dan h) binatang termasuk manusia.
 5. Metafisika (*al-ilmu al-ilahi*) terdiri dari: a) makhluk dan esensinya, b) dasar-dasar argumen demonstratif pada ilmu-ilmu teoritis, dan c) kesatuan makhluk secara mutlak.
 6. Ilmu politik, jurisprodensi (ilmu fiqh), dan ilmu kalam.

Sementara al-Ghazali dan Ibnu Khaldun sendiri membagi ilmu berdasar pada obyek kajian ilmu. Menurutnya, ilmu itu ada yang didasarkan pada wahyu (*naqliyah*), ada juga yang berdasarkan pada hasil intelektual manusia (*aqliyah*). Kondisi inilah yang mendorong al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Ilmu *Naqliyah* yang memiliki hukum fardlu 'ain, terdiri dari: a) ilmu tauhid, b) ilmu tentang kenabian, c) eskatalogi, dan d) ilmu tentang sumber ajaran Islam (tafsir, hadits, ushul fiqh dan sejarah);
2. Ilmu *Aqliyah* yang memiliki hukum fardlu kifayan, terdiri dari: a) matematika (aritmatika, geometri, astronomi, dan musik); b) logika, c) Ilmu fisika (kedokteran, meteorologi, minerologi, dan kimia), serta d) ilmu metafisika (antologi, substansi alam, tasawuf, dan ilmu tentang hubungan Tuhan dengan alam).

Dilihat dari hierarki ilmu yang ditawarkan tokoh tersebut telah memberikan kemudahan bagi para pengembang kurikulum dalam menyusun struktur kurikulum yang dibutuhkan. Mereka tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian mereorganisasinya secara sistematis, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik yang akan mempelajarinya.

BAB VIII

KESIMPULAN

Pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada empat krisis pokok, yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Sedikitnya ada tujuh masalah pokok sistem pendidikan nasional: (1) menurunnya akhlak dan moral peserta didik, (2) pemerataan kesempatan belajar, (3) masih rendahnya efisiensi internal sistem pendidikan, (4) terjadinya degradasi moral peserta didik, (5) status kelembagaan, (6) manajemen pendidikan yang tidak sejalan dengan pembangunan nasional, dan (7) sumber daya yang belum profesional (Tilaar, 1999: 41-43).

Guru dan kurikulum merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, seperti biaya, manajemen, sarana-prasarana, metode, dan pendekatan tidak akan banyak berarti apa-apa apabila esensi pembelajaran, yakni interaksi guru dengan peserta didik serta kurikulum yang diajarkannya tidak berjalan dengan baik. Semua komponen pendidikan tersebut sangat bergantung pada posisi guru dan materi yang diajarkannya. Begitu pentingnya peran guru dan kurikulum dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru dan proses pengembangan kurikulum.

Secara akademis, muatan kurikulum mengandung arti konsep dan rancangan dokumen, namun penerapannya berdasarkan teknis dan membutuhkan banyak pengalaman guru. Sebagai sebuah proses, pengembangan kurikulum dilakukan banyak pihak, mulai dari pihak kementerian pendidikan nasional (baca: pusat kurikulum), pakar ilmu pendidikan, administrator pendidikan, orang tua, peserta didik, hingga guru sebagai pengembang kurikulum yang secara operasional dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Oemar Hamalik

mengatakan bahwa, guru dianggap sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan kurikulum. Peranannya sebagai pengembang kurikulum, antara lain melakukan: 1) pengelolaan administratif; 2) pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum; 3) meningkatkan keberhasilan sistem intruksional; 4) meningkatkan pemahaman konsep diri; serta 5) memupuk hubungan timbal balik yang harmonis dengan peserta didik. Dalam konteks pengembangan kurikulum, guru adalah sosok paling "bertanggung jawab" dalam penyuguhan materi yang diajarkan. Pembelajaran harus didasarkan pada pencapaian Indikator Kompetensi (IK) yang telah disiapkan guru. Setiap guru mengemban tanggung jawab secara efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengadministrasian dan perubahan kurikulum. Keterlibatan guru juga akan turut menentukan keberhasilan pengajaran di sekolah. Karena pada dasarnya, para guru itulah yang paling mengetahui berbagai masalah kurikulum yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, berbagai saran mereka sangat diperlukan dalam perencanaan atau penyusunan kurikulum baru, tentu saja melalui prosedur langsung maupun tidak langsung (Oemar Hamalik, 2009: 52).

Kurikulum tertulis berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum terbaik yang diharapkan dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan. Kurikulum tertulis juga mencerminkan cita-cita besar yang menjadi idealitas lembaga pendidikan. Idealitas lembaga sebuah lembaga tergambar dari rumusan visi, misi, tujuan yang diharapkan. Visi yang menggambarkan cita-cita luhur harus menjadi penyemangat (*ruh*) lembaga pendidikan dalam menjalankan edukasi rutin di sekolah/madrasah. Kondisi ini tentu harus didukung oleh grand desain kurikulum yang terukur, dari target pencapaian lulusan (SKL), tujuan pembelajaran, materi pelajaran, hingga penerapan proses evaluasinya. Inilah yang disebut kurikulum ideal, kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi guru maka kurikulum ini juga disebut kurikulum formal atau kurikulum tertulis (*written curriculum*). Semakin ideal konsep kurikulum yang ditawarkan, maka semakin mengukuhkan sebuah lembaga pendidikan.

Fungsi kurikulum lebih menitikberatkan pada sejauhmana keberadaan kurikulum berdampak pada komponen lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, bagaimana fungsi kurikulum terkait dengan guru dan peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran, bagaimana kurikulum memberikan rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan, bagaimana kurikulum menunjukkan distingsi sekolah sehingga membedakan dengan institusi pendidikan yang lain. Secara umum fungsi kurikulum sendiri berarti alat yang digunakan semua komponen pendidikan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dilihat dari fungsinya, kurikulum akan memberikan nilai kemanfaatan secara langsung pada peserta didik, pendidik, dan praktisi pendidikan.

Dalam konteks global, kompetensi seorang guru sangat diperlukan, terutama terkait dengan kemampuan memberikan wawasan keilmuan serta informasi terbaru tentang pendidikan. Hal ini sebagaimana diungkap Ilghiz Sinagatullin dalam bukunya *Teaching Is More Than Pedagogical Practic* yang mengatakan bahwa:

To enhance global competency, educators need to increase their global knowledge base. First of all, they are required to enrich their global knowledge in the subject areas that they are teaching. For instance, a history teacher inspired by global perspectives needs to learn more about world history. The teacher can then integrate this information into the teaching process, which may considerably motivate children's cognitive processes. (Sinagatullin, 18)

Untuk meningkatkan kompetensi global, pendidik perlu meningkatkan basis pengetahuan global mereka. Pertama-tama, mereka diwajibkan untuk memperkaya pengetahuan global mereka di bidang studi yang mereka ajarkan. Misalnya, seorang guru sejarah terinspirasi oleh perspektif global perlu belajar lebih banyak tentang sejarah dunia. Guru kemudian dapat mengintegrasikan informasi ini ke dalam pengajaran proses, yang sangat mungkin memotivasi proses kognitif anak-anak. Untuk itu, kompetensi sangat berkaitan dengan aspek sikap (*attitude*), pengetahuan, dan keterampilan seorang guru dalam pembelajaran.

Dalam pandangan Islam, sebagaimana diwakili pemikir pendidikan Islam, seperti Imam al-Ghazali, menyebutkan bahwa ciri-ciri guru profesional adalah ketika guru memiliki sifat-sifat antara lain: 1) menerima segala problema peserta didik dengan hati dan sikap yang terbuka dan tabah; 2) Bersikap penyantun dan penyayang (Q.S. *Ali Imran*, 3:15); 3) Menjaga kewibawaan dan kehormatannya dalam bertindak; 4) Menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap sesama (Q.S. *al-Najm*, 53: 32); 5). Bersikap rendah hati ketika

menyatu dengan kelompok masyarakat, (Q.S. *al-Hijr*, 15:88); 6) Menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dan sia-sia; 7) Bersikap lemah lembut dalam menghadapi peserta didik yang tingkat kecerdasannya rendah, erta membinanya sampai pada taraf maksimal; 8) Meninggalkan sifat marah dalam menghadapi problema peserta didik; 9) Memperbaiki sikap peserta didiknya, dan bersikap lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya; 10) Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan tidak sesuai dengan masalah yang dipertanyakan itu tidak bermutu dan tidak sesuai dengan masalah yang diajarkan; 12) Menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didiknya; 13) Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik; 14) Mencegah dan mengontrol peserta didik yang mempelajari ilmu yang membahayakan (Q.S. *al-Baqarah*, 2:195); 15) Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta terus menerus mencari informasi guna disampaikan kepada peserta didik yang akhirnya mencapai tingkat *taqarrub* (kedekatan) dengan Allah SWT. (Q.S. *al-Bayyinah*, 98:5); 16) Mencegah peserta didik mempelajari ilmu *fardlu kifayah* (kewajiban kolektif), seperti ilmu kedokteran, psikologi, ekonomi dan sebagainya, sebelum mempelajari ilmu *fardlu a'in* (kewajiban individual, seperti akidah, syari'ah dan akhlak), serta 17) Mengaktualisasikan informasi yang diajarkan kepada peserta didik (Q.S. *al-Baqarah*, 2:44, dan *al-Shaaf*, 61:2-3). (Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir: 2006, 94-95)

Selanjutnya permasalahan kualitas guru setidaknya bersumber kepada dua hal, yaitu eksternal dan internal, kurangnya pelatihan bagi guru ataupun kurangnya kemauan guru untuk meningkatkan diri. Tidak sedikit guru kita bekerja tanpa pelatihan yang memadai, sedangkan beberapa lagi beralasan bahwa peningkatan kompetensi secara swadaya juga tidak mudah dikondisikan. Mengingat banyaknya beban guru dalam memenuhi kewajiban mengajarnya serta kegiatan administrasi lainnya. Akhirnya guru menghadapi murid dengan keadaan seadanya, minim atau bahkan tanpa inovasi-inovasi baru yang membuat murid menjadi lebih bergairah dalam belajar.

Dalam konteks penerapan kebijakan nasional pendidikan misalnya, gerakan reformasi dilakukan sebagai upaya mengembalikan arah dan semangat pendidikan yang sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945. Pada saat itu, penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung menuruti garis petunjuk dari atas atau indoktrinasi (Tilaar, *Paradigma Bari Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.1998). Segala sesuatunya telah disiapkan, baik berupa juklak, juknis, dan lain sebagainya sehingga tidak ada ruang untuk berkarya. Pendeknya, urusan penyelenggaraan pendidikan dari persoalan yang paling teknis (baca: seragam sekolah), hingga kebijakan konseptual pendidikan (kurikulum) semua menjadi wilayah kekuasaan pemerintah pusat. Oleh karena itu, semangat reformasi sesungguhnya ingin mengembalikan kebijakan pada wilayah/daerah secara otonom, dan memberikan ruang kreatifitas kepada anak bangsa mengembangkan semua potensi yang dimiliki sesuai dengan potensi wilayah-wilayah masing-masing. Semangat inilah yang kemudian cikal bakal lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa “kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain”. Upaya pengembangan kreatifitas sektor pendidikan, tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat (yang bersifat sentralistik), tetapi sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah (otonom).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Richard. (1959). *Learning Theory in Discussion, Resume of the Authoritarian Democratic Studies, Harvard Education Review*.
- Anwar, M. Syafi'i. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Dakir, H. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan & Khairil. (2011). *Profesi Kependidikan*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Dimiyati & Mujiono. (2006). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet.III.
- Djamarah, Syaiful Bahri. (2011). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. Ke-3.
- Fakhrudin, Asef Umar. (2009). *Menjadi Guru Favorit*. Yogyakarta: Diva Press.
- Gunawan, Ary. (1995). *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. (2006). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Hanafiah & Cucu Suhana. (2012). *Konsep Strategi Pembelajaran*. Bandung: Refika Aditama, cet.ke-3.
- Hasan, Hamid, *Perkembangan Kurikulum: Perkembangan Ideologis dan teoritik Pedagogis (1950–2005)*, https://www.geocities.ws/konferensinasionalsejarah/s_hamid_hasan.pdf
- Kunandar. (2007). *Guru Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Madjid, Nurcholish. (1997). *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Mulyasa, E. (2003). *KBK, Konsep Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mustafa,A & Abdullah Aly. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, S. (2012). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nata, Abuddin. (2004). *Pendidikan Islam di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar tgl 20 Maret 2004), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- Sabri, Ahmad. (2007). *Strategi Belajar Mengajar & Micro Teaching*. Ciputat: Quantum Press, Cet. II.
- Sagala, Syaiful. (2006). *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: CV. Alfabeta, cet. IV.
- Salinan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Salinan Undang-Undang No. 4 tahun 1950 Jo UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pendidikan dan Pengajaran
- Sanjaya, Wina. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Prenada Group.

- Sardiman. _____. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-21.
- Sujana, Nana. (1989). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung, Sinar Baru, Cet. II.
- Sukamdinata, Nana S. (2006). *Pengembangan Kurikulum teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda karya.
- Susilo, M. Joko. (2007). *KTSP, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah*. Jakarta:PT. Pustaka Belajar Offset.
- Syaodih, Nana. (2006). *Pengembangan kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Syaodih, Nana. (2011). *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Udin, Taufik. (2015). *Pengertian Motivasi belajar Siswa Menurut Para Ahli Definisi*. [http://taufikudin.wordpress.com/Pengertian Motivasi belajar Siswa Menurut Para Ahli Definisi](http://taufikudin.wordpress.com/Pengertian-Motivasi-belajar-Siswa-Menurut-Para-Ahli-Definisi), diunduh 24 Oktober 2015, 22.00 WIB.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1950
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1950
- Uno, Hamzah B. (2011). *Teori Motivasi dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-8.
- Yamin, Martinis. (2006). *Profesionalisasi dan Implementasi KBK*. Jakarta: PT. Gaung Persada Press.